



**DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KRISIS  
PENGUNGGI ROHINGYA**

***INDONESIA'S DIPLOMACY TO RESOLVE ROHINGYA REFUGEES  
CRISIS***

**SKRIPSI**

Oleh

**NOURMA MEYSITA HADI**

**NIM 140910101020**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KRISIS  
PENGUNGGI ROHINGYA**

***INDONESIA'S DIPLOMACY TO RESOLVE ROHINGYA REFUGEES  
CRISIS***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**NOURMA MEYSITA HADI**

**NIM 140910101020**

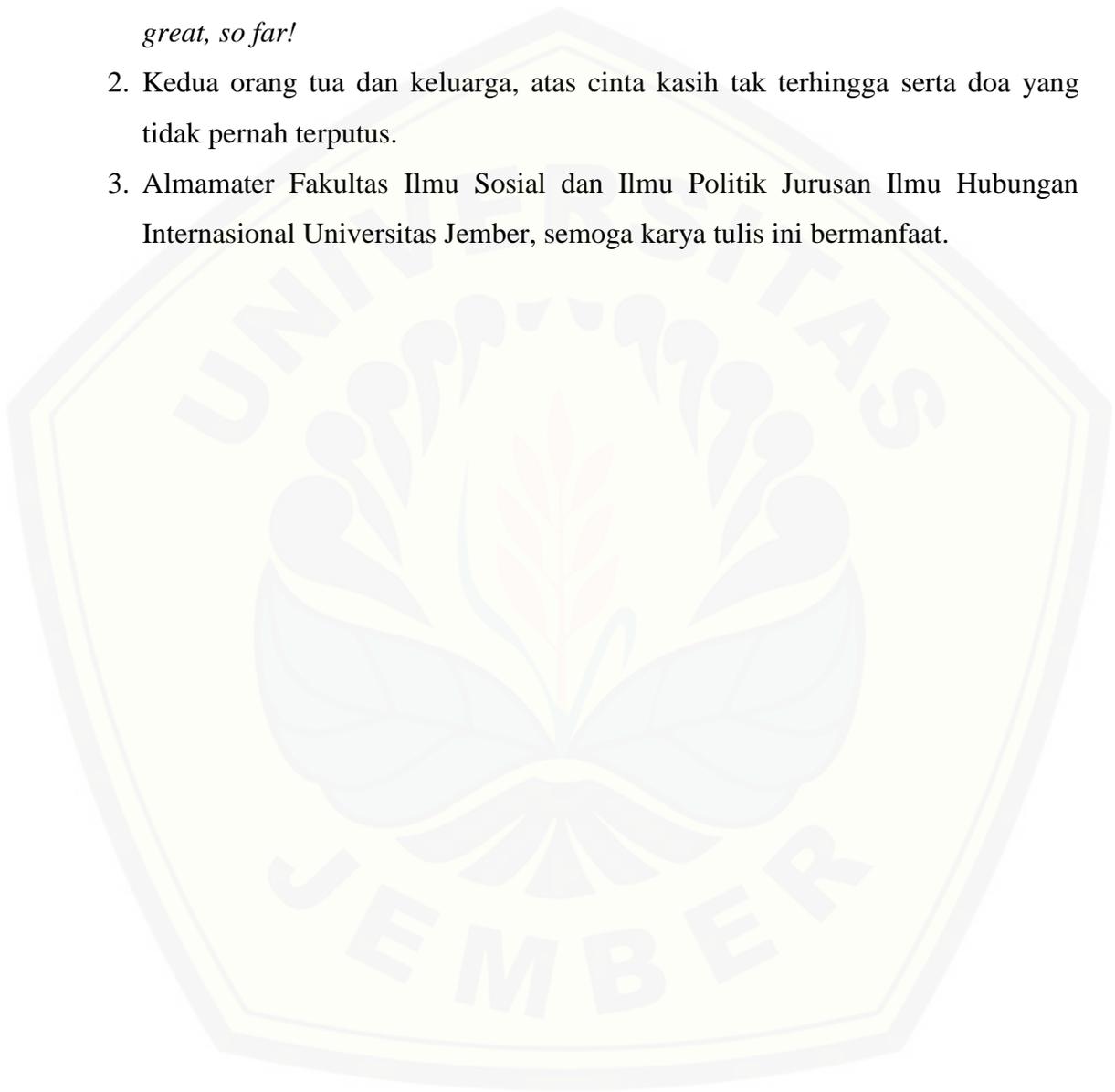
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Diri saya sendiri, atas perjuangan yang sejauh ini sudah saya lakukan. *You did great, so far!*
2. Kedua orang tua dan keluarga, atas cinta kasih tak terhingga serta doa yang tidak pernah terputus.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, semoga karya tulis ini bermanfaat.



## MOTTO

The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others.

(Albert Schweitzer)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Jones, Robert. 2017. *Albert Schweitzer-Life of Service & Compassion*. <http://infinitefire.org/info/albert-schweitzer-a-life-of-service-compassion/>. Diakses pada 23 Mei 2018.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nourma Meysita Hadi

NIM : 140910101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 18 Mei 2018  
yang menyatakan,

Nourma Meysita Hadi  
NIM 140910101020

**SKRIPSI**

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KRISIS  
PENGUNGSI ROHINGYA**



Oleh

**NOURMA MEYSITA HADI**

**NIM 140910101020**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Susilo, M.Si**

**Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, SIP. M.A**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Jumat  
tanggal : 18 Mei 2018  
waktu : 09.00 WIB  
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D  
NIP 196402081989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP 195908311989021001

Fuat Albayumi, S.IP., MA  
NIP 197404242005011002

Anggota I

Anggota II

Agus Trihartono, S.Sos, MA., Ph.D  
NIP 196908151995121001

Drs. Supriyadi, M.Si  
NIP 195803171985031003

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

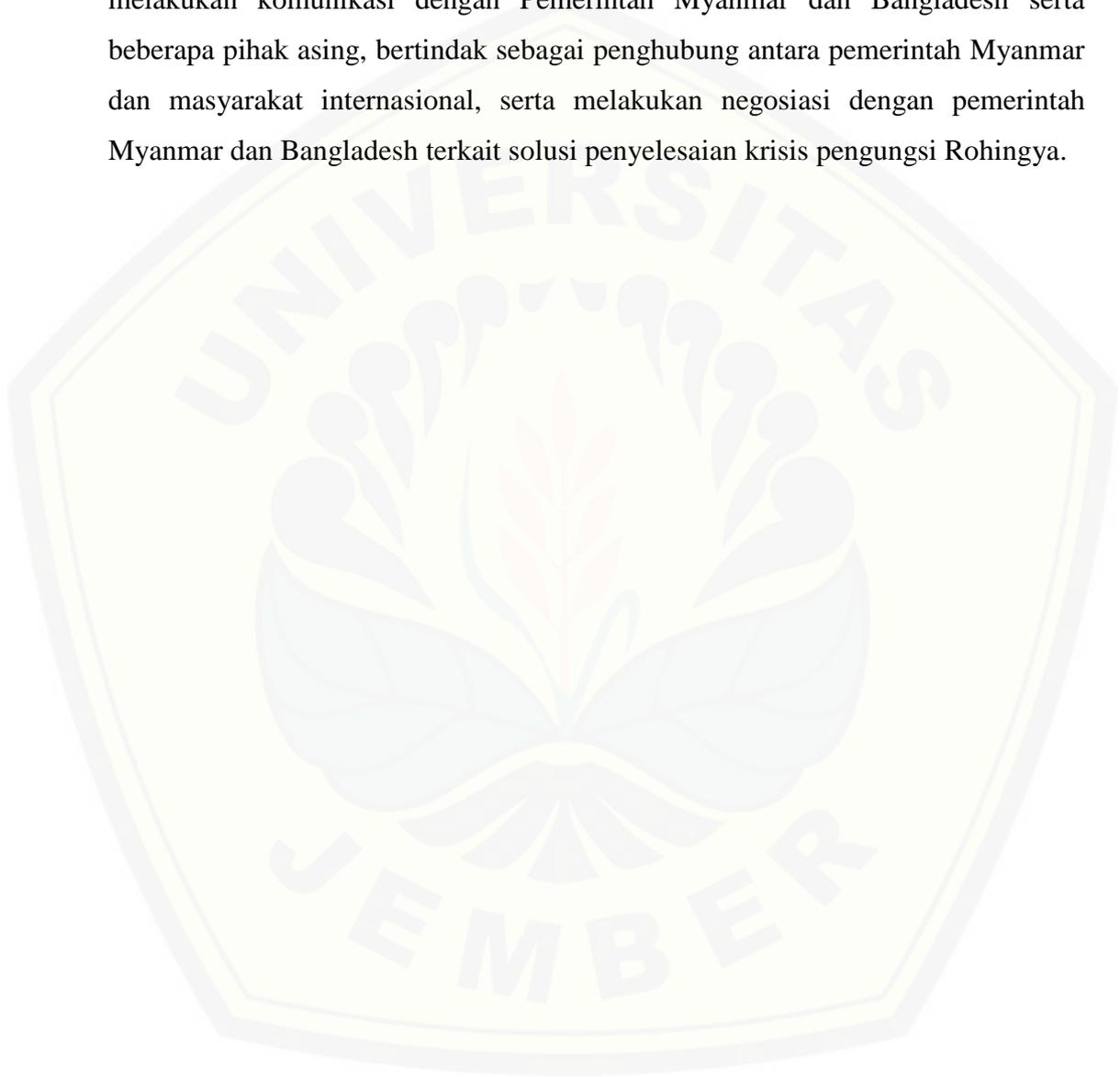
***Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya;*** Nourma Meysita Hadi; 140910101020; 2018; 100 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pada tahun 2017, terjadi konflik bersenjata di wilayah Rakhine Myanmar antara kelompok ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) dengan militer Myanmar. Situasi tegang yang terjadi di Rakhine menyebabkan etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Namun pemerintah Bangladesh justru meningkatkan basis militernya di perbatasan, agar pengungsi Rohingya tidak dapat memasuki wilayah Myanmar. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, kehilangan rasa aman, tanpa jaminan kesehatan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang meregang nyawa. Peristiwa ini mendapat perhatian dari masyarakat internasional, baik berupa kecaman terhadap pemerintah Myanmar maupun bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Namun sayangnya, pemerintah Myanmar justru memblokir akses bagi pihak asing, bahkan hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Ketika pemerintah Myanmar menutup akses bagi pihak asing, Indonesia justru melakukan kunjungan diplomatik ke Myanmar. Kunjungan ini dilakukan untuk berdialog dengan otoritas Myanmar guna membahas penyelesaian kasus ini. Langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk memperoleh kepercayaan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya akibat konflik yang terjadi di Rakhine pada tahun 2017 merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature research*. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana untuk pengumpulan data berasal dari media cetak dan media online seperti berita online atau website resmi, buku cetak maupun elektronik (e-book), serta jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data-data tersebut

dianalisis, kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan yang meliputi; melakukan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh serta beberapa pihak asing, bertindak sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional, serta melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait solusi penyelesaian krisis pengungsi Rohingya.



## PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rasa syukur yang tak hentinya Penulis ucapkan, karena berkat segala ridha dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya”**. Dalam karya ilmiah ini, Penulis berusaha untuk menjelaskan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menangani krisis pengungsi etnis Rohingya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya Penulis dapat bekerja sendiri. Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, nasehat, bantuan dan pelayanan, yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberi arahan, nasehat dan kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini, serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Fuat Albayumi, SIP. M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi arahan, nasehat dan kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini, serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
5. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

7. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2014. Semoga kita semua menjadi orang sukses.
9. Teman-teman Wisma Santika I, selaku tim sukses divisi hiburan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

Jember, 18 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>10</b>
1.2.1 Batasan Materi .....	11
1.2.2 Batasan Waktu.....	11
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>12</b>
<b>1.6 Argumen Utama .....</b>	<b>16</b>
<b>1.7 Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.7.2 Teknik Analisis Data .....	16
<b>1.8 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB 2. KRISIS PENGUNGGI ROHINGYA.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1 Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar .....</b>	<b>18</b>
<b>2.2 Gelombang Migrasi Etnis Rohingya pada Masa Kolonial .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Krisis Pengungsi Rohingya Setelah Merdeka.....</b>	<b>23</b>

<b>2.4 Krisis Pengungsi Rohingya Pasca Konflik di Rakhine pada Tahun 2017.....</b>	<b>30</b>
--	-----------

## **BAB 3. ALASAN INDONESIA TERLIBAT DALAM PENYELESAIAN KRISIS PENGUNGI ROHINGYA..... 35**

### **3.1 Indonesia adalah Negara yang Dipercaya oleh Myanmar ..... 35**

#### **3.1.1 Respon Organisasi Internasional Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya ..... 36**

3.1.1.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)..... 36

3.1.1.2 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ..... 37

3.1.1.3 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)..... 39

3.1.1.4 Uni Eropa ..... 40

3.1.1.5 Human Rights Watch (HRW)..... 42

#### **3.1.2 Respon Negara-Negara Lain Terhadap Krisis Rohingya..... 43**

3.1.2.1 Malaysia ..... 43

3.1.2.2 Turki..... 44

3.1.2.3 Amerika Serikat ..... 46

3.1.2.4 Inggris ..... 48

3.1.2.5 China ..... 49

### **3.2 Hubungan Baik Antara Indonesia dan Myanmar serta Adanya Kesamaan Antara Indonesia dan Myanmar..... 52**

### **3.3 Agenda Strategis Politik Luar Negeri Indonesia..... 54**

3.3.1 Landasan Idiil Politik Luar Negeri Indonesia..... 55

3.3.2 Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia ..... 55

3.3.3 Landasan Operasional Politik Luar Negeri Indonesia ..... 56

<b>BAB 4. LANGKAH-LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA.....</b>	<b>58</b>
<b>4.1 Langkah-langkah Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya.....</b>	<b>58</b>
4.1.1 Indonesia Melakukan Komunikasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh serta Beberapa Pihak Asing .....	62
4.1.2 Indonesia Bertindak Sebagai Penghubung Antara Pemerintah Myanmar dan Masyarakat Internasional.....	66
4.1.3 Indonesia Melakukan Negosiasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh Terkait Solusi Penyelesaian Krisis Pengungsi Rohingya .....	68
4.1.3.1 Indonesia Melakukan Negosiasi dengan Pemerintah Myanmar.....	69
4.1.3.2 Indonesia Melakukan Negosiasi dengan Pemerintah Bangladesh.....	71
<b>4.2 Capaian Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017.....</b>	<b>73</b>
4.3.1 Indonesia Memperoleh Informasi yang Akurat Terkait Kondisi di Rakhine Pasca Konflik Tahun 2017.....	73
4.3.2 Indonesia Menjadi Penghubung Antara Pemerintah Myanmar dan Masyarakat Internasional .....	75
4.3.3 Pemerintah Myanmar dan Bangladesh Melakukan Pertemuan Bilateral .....	77
4.3.4 Implementasi Formula 4+1 Sebagai Solusi Penyelesaian Krisis Pengungsi Rohingya.....	78
4.3.5 Pemerintah Bangladesh Bersedia Memberi Perlindungan Kepada Pengungsi Rohingya .....	82

<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>84</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Etnis Rohingya adalah salah satu etnis di Myanmar. Myanmar merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, dengan luas wilayah 676.577 km<sup>2</sup> (KBRI Myanmar, 2015). Dengan luas wilayah tersebut, Myanmar sanggup menampung 51.486.253 jiwa, yang terdiri dari 24.824.586 orang laki – laki dan 26.661.667 orang perempuan (Kementerian Imigrasi dan Populasi Myanmar, 2015)<sup>2</sup>. Myanmar adalah negara yang spesial, hingga dijuluki “The Golden Land” (KBRI Myanmar, 2015). Keistimewaan Myanmar terletak pada sumber daya alamnya yang melimpah serta keberagaman suku yang menjadikan Myanmar kaya akan budaya. Lokasi geografis Myanmar yang terletak di antara Bangladesh, India, China, Laos dan Thailand (KBRI Myanmar, 2015), menyebabkan kondisi sosial masyarakat Myanmar dipengaruhi oleh dua perbedaan ras yang signifikan, yakni; ras Bengali dan ras Mongoloid. Ras tersebut membawa kebudayaan, bahasa, serta agama yang berbeda. Seperti etnis Rohingya yang merupakan ras Bengali, memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda dari etnis Burma ras Mongoloid.

Mayoritas populasi di Myanmar merupakan etnis Burma Budhis ras Mongoloid dengan populasi sekitar 50% hingga 75%. Sedangkan etnis Rohingya dengan ras Bengali muslim hanya menempati kedudukan 4% dari jumlah total keseluruhan populasi etnis di Myanmar. Sebenarnya masih banyak etnis minoritas lain di Myanmar, seperti etnis Shan dengan populasi 9%, etnis Karen dengan populasi sekitar 7%, serta etnis Mon, etnis Rakhine, etnis Chin, etnis Kachin, etnis Kayan, etnis China, etnis Danu, etnis Akha, etnis Kokang, etnis Lahu, etnis Naga, etnis Palaung, etnis Pao, etnis Tavoyan, dan etnis Wa dengan masing-masing populasinya sekitar 5% dari jumlah total populasi etnis keseluruhan di Myanmar (Bustaman, 2013). Namun khusus bagi etnis Rohingya, pemerintah Myanmar

---

<sup>2</sup> Dalam laporan sensus penduduk tersebut menyebutkan bahwa data tersebut diperoleh pada sensus tahun 2014 dan tidak termasuk warga negara Myanmar yang berada di luar Myanmar, kecuali perwakilan – perwakilan diplomatik Myanmar yang bekerja di luar negara Myanmar sebanyak 972 orang (Kementerian Imigrasi dan Populasi Myanmar, 2015).

tidak bisa mengatasi perbedaan budaya yang ada, terutama sejak pemerintah Myanmar dipimpin oleh junta militer. Terdapat sensitivitas yang sangat kuat dari pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Hal ini berdasarkan bukti adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, seperti tidak menganggap etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Bahkan pada data terakhir sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Populasi Myanmar tahun 2015, etnis Rohingya tidak dimasukkan dalam data tersebut (Kementerian Imigrasi dan Populasi Myanmar, 2015: 17-18).

Etnis Rohingya tinggal di provinsi Rakhine State. Kebanyakan mereka tinggal di wilayah utara Rakhine State yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Rakhine State adalah salah satu provinsi di Myanmar bagian barat, dengan Sittwe sebagai ibukota provinsi. Rakhine State memiliki luas wilayah 36.762 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi 2.098.807 jiwa. Namun dalam laporan sensus penduduk tersebut, terdapat sekitar 1.090.000 jiwa di wilayah Rakhine State yang tidak masuk dalam hitungan (Kementerian Imigrasi dan Populasi Myanmar, 2015:11). Bisa jadi sekitar 1.090.000 orang tersebut adalah jumlah populasi etnis Rohingya tahun 2014. Selain dihuni oleh etnis Rohingya, wilayah Rakhine State juga dihuni oleh etnis Rakhine yang beragama Budha. Sensitivitas orang-orang Budhis Burma, termasuk etnis Rakhine terhadap muslim etnis Rohingya sebagai “warisan” sejarah masih terpelihara hingga saat ini. Jadi selain akibat diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar, etnis Rohingya juga mendapat diskriminasi sosial dari masyarakat Myanmar itu sendiri; etnis Rakhine yang berada satu wilayah dengan etnis Rohingya.

Konflik yang kerap terjadi di Myanmar antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar mengakibatkan krisis pengungsi bagi penduduk Rohingya. Situasi yang tidak aman ketika konflik menyebabkan penduduk Rohingya terpaksa melakukan eksodus<sup>3</sup> ke negara lain untuk mencari perlindungan. Sebagai negara yang paling dekat dengan wilayah Rakhine, Bangladesh menjadi negara tujuan utama para pengungsi Rohingya. Ketika para pengungsi Rohingya mencari

---

<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksodus merupakan perbuatan meninggalkan tempat asal (negara) oleh penduduk secara besar-besaran (KBBI, 2017).

perlindungan ke Bangladesh, pemerintah Bangladesh justru menolak kehadiran mereka. Mereka terlantar di perbatasan Bangladesh dengan kondisi kelaparan, tanpa jaminan kesehatan dan keamanan. Hal inilah yang kemudian menjadi krisis kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya, dimana mereka tidak dapat memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia. Hak-hak dasar tersebut antara lain; hak untuk hidup, hak memperoleh tempat tinggal, perlindungan dan rasa aman, hingga keadilan untuk memperjuangkan hidupnya.

Krisis pengungsi yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan akibat dari konflik dalam negeri Myanmar yang sudah lama berlangsung. Pemerintah Myanmar yang kurang serius dalam mengatasi krisis kemanusiaan ini menyebabkan konflik komunal berkepanjangan yang terjadi seakan-akan memang sengaja diciptakan oleh pemerintah Myanmar, dengan tujuan untuk membersihkan etnis Rohingya itu sendiri. Dugaan adanya pembersihan etnis Rohingya yang dilakukan pemerintah Myanmar bukan tanpa alasan. Rentetan peristiwa yang dialami etnis Rohingya hingga menyebabkan krisis kemanusiaan pada dasarnya telah memenuhi definisi pembersihan etnis menurut Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948. Konvensi tersebut mengatakan bahwa genosida adalah perbuatan dengan tujuan untuk menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, dan kelompok agama dengan cara membunuh atau membatasi hak dan kebebasan mereka (Elsam, 2014: 4-5). Hal ini dibuktikan dengan aksi kekerasan dan kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Operasi militer yang disebut dengan “Operasi Naga Min” pada tahun 1978 dilakukan untuk membersihkan etnis Rohingya di wilayah Rakhine (DW, 2015). Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya semakin buruk ketika pemerintah militer Myanmar tidak memasukkan etnis Rohingya sebagai etnis nasional dalam konstitusi Myanmar pada tahun 1982 (Waskito, 2016). Status *stateless* yang disandang etnis Rohingya menyebabkan ruang gerak mereka sangat terbatas. Mereka tidak dapat mencari pekerjaan, bahkan bepergian baik dalam negeri maupun luar negeri Myanmar. Akhirnya mereka memilih jalan keluar dengan pergi meninggalkan Myanmar secara diam-diam. Mereka mencari perlindungan ke berbagai negara tetangga Myanmar baik

melalui jalur laut menggunakan perahu maupun menyusuri perbatasan Myanmar dengan berjalan kaki tanpa adanya jaminan kesehatan.

Isu kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya menuai respon dari masyarakat internasional. Respon yang diberikan bermacam-macam, baik berupa kecaman yang memojokkan pemerintah Myanmar maupun tawaran pemberian bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Respon tersebut datang dari banyak pihak, baik organisasi internasional maupun negara-negara lain. Namun sikap pemerintah Myanmar justru menutup diri dari pihak asing terkait kasus ini, walaupun hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Bahkan PBB gagal mengatasi isu kemanusiaan ini. Keikutsertaan PBB dalam penyelesaian kasus kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya ini merupakan mandat dari Konvensi PBB tentang hak asasi manusia tahun 1948. Konvensi ini menyebutkan bahwa PBB memiliki tanggung jawab melakukan tindakan untuk melindungi sebuah populasi dari genosida dan kejahatan kemanusiaan lain. Langkah penyelesaian yang dilakukan PBB salah satu prosedurnya melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Dalam kasus krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya, PBB secara kelembagaan telah mengeluarkan dua resolusi. Resolusi pertama dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2007. Resolusi ini gagal dilakukan karena China dan Russia menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi ini. Resolusi kedua yakni pada 26 Maret 2017 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta atas konflik yang terjadi di Rakhine. Resolusi ini belum berhasil dilakukan karena pada prakteknya, pemerintah Myanmar menolak kehadiran Tim Pencari Fakta yang dikirimkan oleh PBB ke wilayah Rakhine.

Selain PBB, ada beberapa negara yang merespon terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Turki, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Indonesia. Dari ke enam negara tersebut, hanya China dan Indonesia yang 'didengar' oleh Myanmar. Namun posisi China yang berada di pihak pemerintah Myanmar, menyebabkan solusi yang diberikan China terkait penyelesaian kasus kemanusiaan ini tidak netral karena hanya mendukung pemerintah Myanmar.

Indonesia adalah negara tetangga Myanmar yang turut merespon krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Berbeda dari sikap negara lain, yang mengecam dan memojokkan pemerintah Myanmar, Indonesia secara aktif turut membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya. Keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di latar belakang oleh landasan negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam landasan negara tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendukung perdamaian dunia. Selain itu dukungan masyarakat Indonesia yang sesama muslim dengan etnis Rohingya, mendorong pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam penyelesaian krisis pengungsi Rohingya.

Indonesia dan Myanmar memiliki sejarah hubungan bilateral yang baik. Hubungan baik ini telah terjalin sejak Indonesia sedang berjuang memperoleh kemerdekaannya. Myanmar merupakan salah satu negara yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mengizinkan Indonesia untuk membuka *Indonesian Office* di Myanmar (KBRI di Myanmar, 2007). Hubungan antara Indonesia dan Myanmar saling mendukung satu sama lain. Indonesia dan Myanmar terlibat dalam pembentukan Gerakan Non-Blok, hingga terselenggara Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Myanmar adalah negara yang memberi dukungan kepada Indonesia ketika wilayah Irian Barat hampir lepas ke tangan Belanda pada tahun 1962. Indonesia juga mendorong Myanmar agar bergabung dengan ASEAN, dan akhirnya berhasil menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997 (Kemlu, 2007). Hubungan baik yang telah terjalin lama antara kedua negara ini menjadi bekal Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya.

Hubungan Indonesia dengan Myanmar meningkat pasca terjadinya konflik yang terjadi di Rakhine pada tahun 2012. Keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya ini sejalan dengan peningkatan kekerasan dan gelombang pengungsi Rohingya dalam jumlah besar ke negara-negara tetangga Myanmar, termasuk Indonesia. Peristiwa ini bermula pada tanggal 28 Mei 2012 ketika terjadi perampokan dan pemerkosaan terhadap

seorang perempuan Rakhine yang diduga dilakukan oleh beberapa pemuda Rohingya. Kejadian ini membuat isu kesukuan di Myanmar kembali memanas. Terjadi aksi kekerasan, pembunuhan, hingga pembakaran perkampungan yang ditinggali etnis Rohingya (Kumaran, 2017). Pasca terjadinya kerusuhan tersebut, banyak bermunculan kelompok-kelompok perlawanan yang berasal dari etnis Rohingya. Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya atas perlakuan kesewenangan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Namun kelompok-kelompok ini dianggap sebagai kelompok pemberontak oleh pemerintah Myanmar. Untuk itu pemerintah Myanmar berniat untuk membersihkan kelompok-kelompok tersebut karena dianggap membahayakan keamanan negara.

Dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya pasca terjadi konflik di Rakhine pada tahun 2012, Indonesia turut membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya. Namun langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya pasca terjadinya konflik pada tahun 2012 kurang massif dilakukan. Hal ini dikarenakan sikap politis pemerintah Indonesia kurang tegas dalam mengatasi kasus ini. Indonesia melakukan pendekatan dengan prinsip saling menghormati dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pemerintah Indonesia hanya memberi himbuan kepada pemerintah Myanmar agar menerima pengamat internasional untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di wilayah Rakhine. Selain itu Indonesia juga menawarkan bantuan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan ini dengan mengirimkan ahli penyelesaian konflik yakni Jusuf Kalla. Langkah konkrit justru dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti PMI, ACT, partai politik, NU, Muhammadiyah, untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik (Nurhandayani, 2013: 32).

Pada tahun 2015 kembali terjadi krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Pada bulan Februari 2015 Presiden Thein Sein secara resmi mengumumkan untuk mencabut kartu putih bagi etnis Rohingya (BBC, 2015). Padahal kartu putih tersebut digunakan etnis Rohingya sebagai ijin tinggal sementara di Myanmar. Kartu putih tersebut juga bisa digunakan sebagai hak pilih mereka dalam pemilu.

Bersamaan dengan pencabutan efektifitas kartu putih bagi etnis Rohingya, militer Myanmar juga melakukan pembersihan warga negara yang dianggap ilegal. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah Myanmar kembali melakukan operasi militer di Rakhine. Maka dari itu etnis Rohingya kembali melakukan eksodus ke berbagai negara tetangga Myanmar (Tirto, 2016). Lebih dari 25.000 etnis Rohingya mencari perlindungan ke negara-negara tetangga. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa tiba di negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Namun sayangnya perjalanan yang mereka lakukan tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan mereka. Akibatnya, banyak dari pengungsi Rohingya yang merengas nyawa dalam perjalanan untuk mencari perlindungan ke negara lain (BBC, 2015).

Pada tanggal 25 Agustus 2017 kembali terjadi konflik di wilayah Rakhine, ketika kelompok bersenjata yang menamakan dirinya sebagai ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) menyerang tentara, polisi, dan 25 pos perbatasan Myanmar. Kelompok ARSA merupakan salah satu kelompok perlawanan yang berasal dari etnis Rohingya. Kelompok ini terbentuk pada tahun 2012 sebagai respon atas krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya akibat konflik di tahun 2012. ARSA menyebut dirinya sebagai kelompok yang memperjuangkan nasib etnis Rohingya. Namun pemerintah Myanmar mengklaim ARSA sebagai kelompok teroris yang ingin mendirikan negara Islam di Rakhine, lebih tepatnya di Kota Maungdaw, wilayah Rakhine bagian utara (BBC, 2017). Merasa kelompok ARSA berbahaya, maka pihak militer Myanmar melakukan serangan balik terhadap kelompok militan ARSA. Akibat dari aksi kekerasan yang terjadi antara militer Myanmar dan kelompok ARSA, sebanyak 370 gerilyawan Rohingya, 13 aparat keamanan, dua pejabat sipil, dan 14 warga sipil tewas. Konflik yang pecah pada tanggal 25 Agustus 2017 ini kemudian berlanjut pada aksi pembakaran perkampungan yang menjadi tempat tinggal etnis Rohingya. Untuk menyelamatkan diri dari ketegangan operasi militer ini, sebanyak puluhan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Namun lagi-lagi Bangladesh sebagai negara utama tujuan pengungsi Rohingya, menolak kehadiran pengungsi Rohingya. Pemerintah Bangladesh bahkan menjalin kerjasama dengan militer

Myanmar untuk mengembalikan warga etnis Rohingya yang memaksa masuk perbatasan Bangladesh, padahal situasi di Rakhine masih belum dalam kondisi aman.

Dalam kurun waktu yang singkat, gelombang pengungsi Rohingya mulai tahun 2015 hingga pasca terjadinya konflik di Rakhine pada bulan Agustus 2017 mengalami kondisi yang memprihatinkan; tanpa tempat tinggal, krisis pangan, tanpa jaminan kesehatan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak, hingga tidak memperoleh rasa aman. Isu kemanusiaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya menjadi perhatian masyarakat internasional. Yang menjadi perhatian masyarakat internasional terhadap kasus ini bukan hanya krisis kemanusiaan yang menimpa pengungsi Rohingya saja, namun juga adanya dugaan praktik pelanggaran HAM genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Masyarakat internasional khawatir akan terjadi kondisi yang semakin buruk dan berupaya untuk segera menemukan solusi atas krisis kemanusiaan tersebut.

Pemerintah Myanmar menuai banyak respon dari masyarakat internasional atas krisis pengungsi Rohingya ini, baik dari organisasi internasional maupun negara-negara lain. Berbagai sikap yang ditunjukkan, baik berupa kecaman keras terhadap pemerintah Myanmar maupun bantuan yang ditawarkan untuk etnis Rohingya. Namun sayangnya sikap pemerintah Myanmar menanggapi kasus kemanusiaan ini justru menutup diri dari pihak asing (Okezone, 2017). Hal ini menyebabkan masyarakat internasional tidak memiliki akses untuk masuk ke Myanmar, bahkan hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Selain itu juga pemerintah Myanmar sangat membatasi media, baik media lokal maupun media asing, sehingga masyarakat internasional menjadi kesulitan dalam memperoleh informasi. Kesimpang-siuran berita yang beredar juga tidak bisa dihindari (BBC, 2017).

Ditengah sikap Myanmar yang memblokir akses pihak asing, Indonesia justru melakukan kunjungan diplomatik ke Myanmar. Terlebih kunjungan ini khusus dilakukan untuk melakukan dialog dengan otoritas Myanmar guna membahas permasalahan ini. Kabar kunjungan Indonesia ke Myanmar pasca

konflik di Rakhine pada tahun 2017 mendapat apresiasi dari masyarakat internasional, karena Indonesia merupakan negara pertama yang mengunjungi Myanmar pasca terjadinya konflik tersebut (DW, 2017). Apresiasi ini sebagai pujian dari masyarakat internasional atas langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan dari pemerintah Myanmar.

Terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya sangat massif. Pasca terjadinya eksodus etnis Rohingya hingga terdampar di lepas pantai utara Aceh pada bulan Mei 2015, Indonesia membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya. Selama berbulan-bulan pengungsi Rohingya mencari suaka melalui jalur laut menggunakan perahu, kondisi mereka yang memprihatinkan kemudian diselamatkan oleh nelayan Aceh. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya.

Ketika pengungsi Rohingya tiba di Indonesia, Indonesia bersedia memberi perlindungan terhadap pengungsi Rohingya dalam jangka waktu satu tahun (Muhamad, 2015: 7). Untuk penanganan pengungsi Rohingya, Indonesia bekerjasama dengan UNHCR, ASEAN, dan IOM. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia secara aktif melakukan diplomasi terkait penyelesaian krisis pengungsi ini. Berkat langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia, pemerintah Myanmar bersedia membuka aksesnya bagi Indonesia untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi korban konflik di Rakhine. Bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia bukan hanya berupa bantuan pokok, namun juga bangunan sekolah dan rumah sakit di wilayah Rakhine. Atas langkah diplomasi Indonesia pula pemerintah Myanmar terbuka dengan masyarakat Internasional. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Dewan Penasehat Rohingya<sup>4</sup> atas usulan Aung San Suu Kyi pada bulan Agustus 2016 (Pujayanti, 2017: 6).

---

<sup>4</sup> Dewan penasehat Rohingya adalah sebuah komisi khusus yang dibentuk atas inisiatif Aung San Suu Kyi pada bulan Agustus 2016. Komisi ini dipimpin oleh mantan sekjen PBB Kofi Annan, dengan tujuan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Komisi ini memiliki masa kerja selama satu tahun, dan telah melaporkan hasil kerjanya pada bulan Agustus 2017. Laporan

Langkah diplomasi Indonesia dilanjutkan ketika kembali terjadi krisis pengungsi Rohingya pasca konflik di Rakhine pada bulan Agustus 2017. Pasca terjadi konflik di wilayah Rakhine, Indonesia adalah negara pertama yang melakukan kunjungan diplomatik ke Myanmar. Atas kepercayaan yang diberikan pemerintah Myanmar kepada Indonesia, Indonesia berkesempatan untuk melakukan dialog dengan otoritas Myanmar untuk membahas penyelesaian krisis pengungsi Rohingya. Berkat langkah diplomasi Indonesia, bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bisa masuk ke wilayah Rakhine. Langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam membangun kepercayaan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya menarik perhatian Penulis untuk meneliti lebih lanjut langkah-langkah diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya, dalam sebuah penelitian yang berjudul :

**“Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian tersebut memiliki batasan-batasan yang jelas dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Ruang lingkup pembahasan juga sangat diperlukan Peneliti untuk mempermudah proses pencarian data mengenai kejadian - kejadian dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya batasan tersebut, akan memudahkan Penulis dalam menganalisa permasalahan penelitian agar lebih mendalam, akurat, dan sistematis. Disamping itu, ruang lingkup pembahasan dapat digunakan sebagai acuan Penulis dalam menentukan landasan konseptual yang sesuai dan dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Atas dasar tersebut, Penulis mengkategorikan ruang lingkup pembahasan menjadi dua, yakni batasan materi dan batasan waktu.

## 1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk menentukan fokus utama materi yang dijadikan permasalahan dalam sebuah karya ilmiah. Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan fenomena yang dianalisa. Sehingga permasalahan tersebut tidak akan melebar pada pembahasan yang lainnya. Untuk itu pada penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup materi mengenai aktivitas diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya akibat konflik yang terjadi di Rakhine pada akhir bulan Agustus 2017.

## 1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang dimaksud adalah mengenai rentang waktu mulai kapan dan sampai kapan materi kajian ini berlangsung. Tujuannya adalah untuk menghindari kekaburan tulisan. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2015 dan batas akhir penelitian ini sampai tahun 2017. Batasan waktu ini dipilih karena menurut penulis dalam rentang waktu tersebut merupakan periode dimana Indonesia secara massif melakukan langkah-langkah penyelesaian krisis pengungsi Rohingya.

## 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu bentuk identifikasi masalah yang berisi pertanyaan. Dengan adanya konsep rumusan masalah maka akan memudahkan proses analisa terhadap objek kajian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan Penulis adalah :

**“Bagaimana diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya Tahun 2017?”**

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penting untuk mengarahkan penulis pada hipotesis yang selanjutnya juga dapat digunakan untuk menentukan unit analisis yang cocok digunakan. Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini adalah untuk

mengetahui langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya pasca konflik pada tahun 2017.

### 1.5 Kerangka Konseptual

Sebuah karya tulis ilmiah memerlukan adanya teori dan konsep dalam menganalisis sebuah permasalahan. Dengan teori dan konsep maka permasalahan yang diangkat akan dikaji secara mendalam dan dikaitkan dengan teori maupun konsep yang terdapat pada kerangka konseptual ini. Setiap permasalahan memiliki teori dan konsep yang berbeda. Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teori dan konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan konsep diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan menurut Minear dan Smith<sup>5</sup> menjelaskan bahwa secara konseptual, diplomasi dan kemanusiaan merupakan hal yang berbeda (Minear dan Smith, 2007: 38). Diplomasi selama ini dipahami sebagai upaya untuk mengedepankan kepentingan nasional dengan cara apapun, sedangkan kemanusiaan mengacu pada nilai-nilai, prinsip dan norma internasional yang diakui secara universal. Sederhananya, kemanusiaan tidak terhalang oleh batas-batas kekuasaan suatu negara, sedangkan diplomasi terikat oleh kekuasaan pemerintah. Aktor kemanusiaan melaksanakan tugas mereka dengan memperhatikan hukum humaniter internasional, dengan kontribusinya sebatas pemberian bantuan berupa hak – hak dasar kemanusiaan kepada korban konflik, seperti hak untuk hidup, makan, tempat tinggal dan kesehatan. Sebaliknya, aktor diplomasi atau diplomat, tugas mereka meliputi aktivitas politik menyangkut kepentingan nasional yang meliputi urusan hubungan luar negeri. Karena kepentingan nasional bermacam – macam, maka kebijakannya pun beragam, seperti kerjasama dalam hal pembangunan, hingga kebijakan imigrasi yang melakukan diskriminasi terhadap orang asing, deregulasi bisnis<sup>6</sup> atas praktik

---

<sup>5</sup> Larry Minear dan Hazel Smith merupakan penulis buku berjudul *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*. Buku ini diterbitkan oleh United Nations University Press di Tokyo pada tahun 2007.

<sup>6</sup> Deregulasi bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deregulasi yakni kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan (<https://kbbi.web.id/deregulasi.html>). Sedangkan bisnis yakni usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha dagang

perburuhan di luar negeri, atau penolakan terhadap campur tangan pencegahan praktik genosida di luar negeri. Apabila aktivitas kemanusiaan dianggap sebagai diplomasi, maka secara tersirat aktor kemanusiaan menjalankan misi mereka ke kepentingan politik yang lebih luas.

Ada perdebatan didalam konsep kemanusiaan dan politik, disatu pihak meminta komitmen netralitas dalam konflik, dipihak lain berpendapat bahwa cukup sulit untuk memisahkan intervensi kemanusiaan dari analisis politik dan bahkan intervensi politik. Disamping itu semua, diplomat kemanusiaan hadir bukan sebagai advokat politik, tetapi sebagai negosiator politik (Minear dan Smith, 2007: 50). Untuk itu aktor diplomasi kemanusiaan harus menjaga tujuan utamanya, yakni; menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menegakkan prinsip – prinsip kemanusiaan, dan pada saat yang bersamaan, mau tidak mau aktor kemanusiaan tersebut terlibat dalam lingkungan yang sensitif secara politis (Minear dan Smith, 2007: 39).

Aktor diplomasi kemanusiaan yang terlibat adalah perwakilan resmi yang berusaha untuk mencapai tujuan melalui cara damai seperti menggunakan seni persuasi, negosiasi dan kompromi untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor diplomasi kemanusiaan harus melakukan; negosiasi secara berkelanjutan, mengajukan *win – win solution*, negosiator utama mampu mengajak pihak lain untuk berada di pihaknya dan mampu melibatkan pihak lain yang berpikiran sama sebagai negosiator lain disamping negosiator utama, mengajukan solusi untuk masalah terkait dan terlibat dalam negosiasi kolaboratif bila memungkinkan (Minear dan Smith, 2007: 299).

Ada beberapa pendapat mengenai aktor dalam praktik diplomasi. Beberapa mengatakan bahwa hanya negara yang terlibat dalam diplomasi, yang menyiratkan bahwa aktor internasional lain mampu bernegosiasi namun mereka tidak melakukan diplomasi profesional. Sementara pendapat lain bersedia memasukkan organisasi antar pemerintah (IGO) sebagai aktor diplomatik (Minear dan Smith, 2007: 43). Namun masih sedikit pendapat yang memasukkan

---

(<https://kbbi.web.id/bisnis.html>). Berdasarkan hal tersebut, deregulasi bisnis bermakna kegiatan menghapuskan pembatasan dan peraturan dalam hal usaha dagang.

organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai pelaku diplomatik, walaupun, ada kecenderungan bagi aktor internasional non-negara lain, seperti individu untuk dapat berkontribusi terhadap usaha diplomatik. Individu dapat terlibat secara pribadi atau diplomasi tidak resmi, atau memiliki peran resmi sebagai utusan khusus organisasi internasional atau pemerintah.

Aktor diplomasi atau diplomat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Tujuan negosiasi yakni mengorbankan beberapa kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima untuk semua pihak. Diplomasi tidak bisa terjadi ketika pihak yang berkonflik tersebut tetap sama – sama mempertahankan kepentingannya sehingga mereka lebih memilih menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan mereka. Diplomat negara dan para aktor kemanusiaan memiliki fungsi yang sama, bahwa mereka harus bergantung pada negosiasi, persuasi dan dialog untuk mencapai kesepakatan.

Diplomasi kemanusiaan umumnya tidak mengandalkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan. Penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan (diplomasi koersif) dianggap tidak efisien untuk dijadikan sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan. Hal ini karena instrumen tersebut kurang tajam untuk digunakan sebagai cara mencapai tujuan diplomasi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan merupakan kegagalan diplomasi kemanusiaan, karena tujuan diplomasi kemanusiaan hampir dapat dikatakan telah dicapai jika kekuatan militer tidak digunakan untuk membunuh, melukai dan merusak kehidupan manusia.

Dalam melakukan diplomasi kemanusiaan, ada beberapa proses yang dapat dilakukan, meliputi; komunikasi untuk pengumpulan informasi, penghubung, dan negosiasi (Minear dan Smith, 2007: 54).

1. Komunikasi untuk pengumpulan informasi. Aktor diplomasi kemanusiaan perlu mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya dari negara tuan rumah (yang berkonflik) untuk dua tujuan: pertama, agar mampu melaksanakan program dan kegiatan mereka secara efisien. Dan kedua, untuk bertanggung jawab kepada pihak – pihak yang turut membantu tentang bagaimana mereka menggunakan dana yang dialokasikan. Melalui proses pengumpulan informasi ini, informasi yang diperoleh aktor diplomasi kemanusiaan bukan hanya

bermanfaat bagi pihak – pihak yang turut membantu, tetapi juga sebagai akses bagi pihak internasional lain untuk menjadi satu – satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, aktor diplomasi kemanusiaan yang dipercaya tersebut memiliki akses istimewa di negara tuan rumah.

2. Penghubung. Aktor diplomasi kemanusiaan melakukan komunikasi antara pemerintah negara tuan rumah dengan kantor pusat aktor diplomasi kemanusiaan tersebut berasal, untuk pengumpulan informasi. Aktor diplomasi kemanusiaan bekerja secara fisik dan politik di zona konflik yang sulit dan berbahaya. Kehadiran mereka sangat bermanfaat untuk mengaktifkan komunikasi politik yang diperlukan antara aktor-aktor yang berkonflik. Karena sering kali konflik terjadi akibat arus komunikasi yang tidak lancar hingga menyebabkan *miss communication*. Selain itu informasi yang diperoleh oleh aktor diplomasi kemanusiaan menjadi saluran komunikasi antara pemerintah negara tuan rumah dengan masyarakat internasional.
3. Perundingan atau negosiasi. Negosiasi adalah proses terakhir dari diplomasi kemanusiaan. Aktor diplomasi kemanusiaan melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Kesepakatan yang dicapai dengan menggunakan instrumen diplomatik klasik seperti persuasi, janji dan dialog.

Berdasarkan konsep kemanusiaan dan diplomasi yang telah dipaparkan sebelumnya, diplomasi kemanusiaan dapat menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Diplomasi kemanusiaan bukan berarti mengesampingkan kepentingan nasional, namun tujuan terpenting yakni bagaimana kepentingan nasional yang ada dapat selaras dengan prinsip – prinsip moral universal. Aktor kemanusiaan dapat terlibat dalam proses diplomasi, tetapi mereka harus sangat berhati – hati dalam membedakan informasi untuk tujuan kemanusiaan. Mereka juga harus berhati-hati dalam peran sebagai komunikator, untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam politik negara tuan rumah yang sedang berkonflik. Di sisi lain, aktor kemanusiaan dapat mempelajari praktik – praktik diplomasi untuk meningkatkan keterampilan negosiasi sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Konsep diplomasi kemanusiaan menjadi relevan dalam penelitian ini dikarenakan aktivitas diplomatik pemerintah Indonesia dalam hal menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya di Myanmar sesuai dengan konsep diplomasi kemanusiaan yang telah dipaparkan di atas.

## **1.6 Argumen Utama**

Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya adalah dengan melakukan diplomasi kemanusiaan yang meliputi; Indonesia melakukan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh serta beberapa pihak asing, Indonesia bertindak sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional, Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait solusi penyelesaian krisis pengungsi Rohingya.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (*Secondary Data*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain dan bukan dengan pengamatan secara langsung, yang berarti penulis tidak berinteraksi secara langsung dengan objek kajian. Metode ini kerap juga disebut sebagai studi kepustakaan.

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan data yang diperoleh dari; perpustakaan pusat Universitas Jember, ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan internet. Sedangkan literatur yang penulis dapatkan berasal dari; media cetak, situs internet atau website resmi, buku cetak maupun elektronik (e-book), serta jurnal ilmiah.

### **1.7.2 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode ini memfokuskan dalam suatu masalah dimana dalam prosesnya tidak sekedar mengumpulkan dan mengolah data, namun juga

menganalisis data, menginterpretasikan, menjelaskan, serta membuat kesimpulan pola suatu fenomena. Dengan harapan dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis agar isi dari karya ilmiah ini dapat dipahami.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menyusunnya berdasarkan sistematika yang dibedakan dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

### **Bab 1. Pendahuluan**

Pada bab ini akan menjabarkan terkait dengan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2. Krisis Pengungsi Rohingya**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai krisis pengungsi Rohingya. Sehingga dalam bab ini menjelaskan bagaimana krisis pengungsi Rohingya dapat terjadi.

### **Bab 3. Alasan Indonesia Terlibat Dalam Penyelesaian Krisis Pengungsi Rohingya**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai alasan mengapa Indonesia ikut terlibat dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya

### **Bab 4. Langkah-Langkah Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya.

### **Bab 5. Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

## **BAB 2. KRISIS PENGUNSI ROHINGYA**

### **2.1 Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar**

Secara geografis negara Myanmar terletak di wilayah Asia Tenggara. Myanmar adalah negara dengan luas wilayah 676.577 km<sup>2</sup>, dengan 51.486.253 penduduk (Kementerian Imigrasi dan Populasi Myanmar, 2015). Myanmar adalah negara yang kaya. Bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya, namun juga kaya akan keberagaman penduduknya. Keberagaman penduduk Myanmar ditunjukkan dengan ada sekitar 135 etnis yang hidup berdampingan di Myanmar (KBRI Myanmar, 2015).

Negara Myanmar berbatasan langsung dengan; Bangladesh dan India di barat laut dan utara, China dan Laos di Timur, serta Thailand di Selatan (KBRI Myanmar, 2015). Wilayah Myanmar yang berbatasan dengan negara-negara tersebut, mempengaruhi karakteristik sosial masyarakat di sekitarnya. Misalnya Myanmar bagian timur yang berbatasan langsung dengan rumpun ras Mongoloid, banyak dipengaruhi oleh etnis China; baik ras, budaya, maupun bahasanya. Contohnya Provinsi Kachin State, Shan State, Kayah State, Karen State, dan Mon State. Sedangkan di bagian barat, yakni di Provinsi Rakhine State, Myanmar berbatasan dengan ras Bengali. Berbeda cerita dengan wilayah Myanmar bagian timur yang mayoritas didiami oleh ras yang serumpun, wilayah Rakhine didiami oleh dua etnis yang kontras; yakni etnis Rohingya dengan ras Bengali beragama Islam, sedangkan etnis Rakhine dengan ras Mongoloid beragama Budha.

Di antara sekian banyak etnis yang ada di Myanmar, etnis Burma, Mishimi, Abor, Chingpaw, Kakhyen, Tai, Siam, Shan, dan Rohingya dapat ditelusuri berdasarkan garis keturunannya. Sekitar 50% sampai 75% penduduk Myanmar berasal dari etnis Burma. Masyarakat Myanmar didominasi oleh agama Budha dan ras Mongoloid yang terbagi menjadi tiga kelompok; Tibet-Burma, Sino-Thailand, dan Mon-Khmer (Bustaman, 2013: 317). Etnis yang paling dekat dengan etnis Burma adalah Mishimi dan Abor. Suku lain yang sedikit mengalami percampuran adalah etnis Chingpaw (Singpho). Etnis yang mirip dengan etnis Burma lainnya adalah etnis Kakhyen. Etnis ini mendiami Myanmar sudah sekitar

dua abad yang lalu dari arah utara dan mendiami wilayah perbukitan timur Bamao. Sedangkan etnis Tai atau Siam merupakan campuran dari masyarakat indo-china. Etnis Shan adalah etnis pertama yang bermigrasi ke selatan, dari daratan Asia Tengah. Mereka menetap di sepanjang sungai Mekong, Menam, Irawadi, dan Brahmaputra. Sedangkan etnis Rohingya yang berada di Myanmar berawal dari sejarah kerajaan Arakan Mrauk-U pada tahun 1430 (Bustaman, 2013: 318).

Istilah “Rohingya” berasal dari kata *Rohai* atau *Roshangee* yang kemudian mengalami penyimpangan terminologi menjadi Rohingya. Sebelumnya mereka disebut “Chittagonian” oleh kolonial Inggris. *Roang / Rohang / Roshang* bukanlah kata yang berasal dari Burma maupun Bengali. Kata tersebut diambil dari kata dalam bahasa Arab yakni *rahham* yang berarti berkat atau rahmat (Bustaman, 2013: 320). Nama tersebut pertama kali digunakan oleh kelompok intelektual Bengali untuk menyebut diri mereka sendiri pada tahun 1950. Pada tahun 1949, setahun setelah merdeka dari kolonial Inggris, terdapat banyak kelompok pemberontak di Myanmar. Salah satu kelompok pemberontak tersebut ingin mengubah Rakhine Utara menjadi negara Islam dan bergabung dengan Pakistan (Bustaman, 2013: 322).

Kelompok pemberontak (yang kemudian menyebut dirinya Rohingya) tersebut ingin berdiri sendiri menjadi negara Islam. Mereka merasa Rakhine (dulu disebut Arakan) adalah tanah mereka, mengingat Rakhine dulu pernah menjadi negara merdeka ketika jaman kerajaan, namun akhirnya runtuh pada tahun 1784 karena ditaklukkan oleh orang-orang Burma. Ketika keinginan mendirikan negara Islam ditolak oleh pemerintah Myanmar, karena menurut pemerintah Myanmar mereka bukan orang asli Rakhine, kemudian kelompok intelektual muslim Bengali menulis fakta historis untuk membuktikan eksistensinya sebagai penduduk pribumi wilayah Rakhine. Sayangnya fakta historis yang ditulis tersebut diragukan kebenarannya, karena setelah diteliti lebih lanjut, ada perbedaan antara tulisan yang dibuat dengan fakta sejarah yang ada. Misal dalam tulisan tersebut, mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah orang Arab dan sudah ada sejak abad kedelapan. Mereka menetap di Rakhine (dulu disebut Arakan)

setelah kapal dagangnya karam di lepas pantai Rakhine. Sementara Maurice Collis<sup>7</sup> mengatakan bahwa Islam masuk ke Rakhine setelah tahun 1430.

Hal yang berbeda dalam tulisan intelektual Bengali selanjutnya adalah ketika mereka menceritakan sejarah kata Rohingya. Pada abad ketujuh, Rakhine masih dikuasai oleh Kerajaan Dhanyawaddy, dan Kerajaan Arakan Mrauk-U belum berdiri. Tidak ditemukan bukti sejarah, jejak pemukiman muslim, atau budaya Arab pada jaman tersebut. Peninggalan situs non-Budha yang ditemukan hanyalah peninggalan Hindu (Bustaman, 2013: 322-323).

Etnis Rohingya adalah keturunan Arab, Moor, Turki, Persia, Moghul Patthan, dan Bangladesh dari daerah Chittagong di Bangladesh yang kemudian menetap di dekat perbatasan Myanmar – Bangladesh; Maungdaw, Buthidaug, dan Rathedaung di Rakhine State Myanmar. Etnis Rohingya menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa resmi negara Myanmar yang berbahasa Burma. Keunikan dari bahasa Rohingya, karena ia merupakan campuran dari bahasa Bengali, Persia, Arab, dan Arakan (Bustaman, 2013: 322).

Kehadiran etnis Rohingya yang beragama Islam di Myanmar bermula ketika jaman kerajaan di Myanmar. Pada tahun 1430, Raja Min Saw Mon mendirikan kerajaan Arakan Mrauk-U. Pemukiman muslim di Rakhine pada jaman kerajaan Mrauk-U berawal ketika Raja Min Saw Mon mengizinkan kelompok muslim Bengali (kemudian menjadi cikal bakal etnis Rohingya) untuk tinggal di daerah pinggiran kerajaan (sekarang wilayah Rakhine). Sebelumnya mereka tinggal di Bangladesh (Chan, 2005: 398). Kerajaan Arakan Mrauk-U bersedia menerima kehadiran kelompok muslim Bengali karena Raja Min Saw Mon berhasil membangun dinasti di Rakhine atas bantuan militer Sultan Benggala yang beragama Islam. Masjid Santikan adalah masjid pertama yang dibangun di tanah Budha tersebut. Pada periode awal ini, jumlah populasi kelompok muslim di Rakhine tidak banyak jumlahnya, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

---

<sup>7</sup> Maurice Collis merupakan penulis asal Inggris yang menulis artikel berjudul “Arakan’s Place in the Civilization of the Bay”, dalam jurnal yang berjudul *Journal of The Burma Research Society XV tahun 1925*. (Bustaman, 2013: 314)

Pada pertengahan abad ketujuh belas, mereka dijadikan buruh di berbagai sektor kerajaan. Baik pada bidang pertanian maupun di pengadilan. Populasi kelompok muslim di wilayah kerajaan ini semakin banyak seiring dengan bertambahnya permintaan tenaga kerja yang semakin besar. Karena hal ini, gaya hidup kerajaan lambat laun banyak mengadopsi dari representasi Islam, walaupun raja-raja Arakan Mrauk-U beragama Budha. Misal nama raja-raja yang menggunakan nama Islam, koin perak yang bertulisan bahasa Persia, penggunaan pakaian muslim dengan gaya sultan Benggala, serta penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa pengadilan. Beberapa fakta tersebut membuktikan bahwa eksistensi kelompok muslim di Kerajaan Arakan Mrauk-U cukup berpengaruh.

## **2.2 Gelombang Migrasi Etnis Rohingya pada Masa Kolonial**

Eksistensi Kerajaan Arakan Mrauk-U berakhir seiring dengan runtuhnya kerajaan ini karena ditaklukkan Burma pada tahun 1784. Myanmar selanjutnya dikuasai Burma selama empat dasawarsa (1784-1824). Pada tahun 1799, sekitar tiga puluh lima ribu orang yang tinggal di Rakhine (tak terkecuali etnis Rohingya) melarikan diri ke Chittagong di India (sekarang Bangladesh). Mereka mencari perlindungan karena penindasan dan pelecehan yang kejam; pemerkosaan, pembunuhan, dan penindasan terhadap orang-orang lemah (Chan, 2005: 399).

Pada tahun 1824, ketika Inggris berhasil menduduki Rakhine, wilayah ini menjadi daerah jarang penduduk akibat migrasi warga Rakhine secara besar-besaran ke Chittagong pada era kekuasaan Burma. Melihat potensi alam yang ada, kemudian kebijakan kolonial Inggris adalah mendorong penduduk Bengali dari Bangladesh untuk bermigrasi ke Rakhine untuk dijadikan buruh tani. Karena pada saat itu daratan India (termasuk Bangladesh) dan Myanmar adalah sesama daerah jajahan Inggris, maka tidak ada batas yang jelas antara kedua negara tersebut. Perpindahan penduduk juga semakin bebas karena menjadi satu wilayah administrasi. Perpindahan penduduk ini sebagian besar dimotivasi oleh pencarian kesempatan kerja yang banyak dilakukan di Rakhine (Chan, 2005: 401). Gelombang migrasi paling banyak ketika awal abad kesembilan belas, setelah pembukaan Terusan Suez. Inggris membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk

menghasilkan permintaan beras yang terus meningkat di pasar internasional. Dalam sensus 1921, banyak Muslim di Rakhine tercatat sebagai orang India (Chan, 2005: 402).

Pada masa kolonial ini, tak jarang terjadi kerusuhan “anti-Bengali” oleh penduduk Rakhine karena kebencian mereka terhadap pendatang Bengali. Kebencian ini karena jumlah pendatang Bengali yang semakin banyak di wilayah Rakhine dan mereka harus bersaing kesempatan kerja dengan pendatang Bengali. Para pendatang Bengali mendirikan desa pemukiman muslim di daerah perbatasan Myanmar-Bangladesh. Walaupun sering terjadi kerusuhan antara penduduk Rakhine dan pendatang Bengali, namun hal ini masih bisa diatasi oleh kolonial Inggris. Kontrol wilayah tetap berada dalam kuasa kolonial Inggris meskipun telah dibentuk komite desa. Komite desa dibentuk berdasarkan peraturan Undang-Undang Amandemen Desa tahun 1924 tentang komite desa, dimana pemuka agama bisa dipilih menjadi dewan desa. Oleh karena itu konflik yang melibatkan isu agama belum terdengar pada era ini, setidaknya hingga era Perang Dunia II, karena biksu Budha yang cukup aktif di komite desa tidak berperan banyak dalam mengatur wilayah desa (Chan, 2005: 402).

Ketegangan Perang Dunia II berimbas pula pada keadaan negara jajahan pelaku perang dunia, tak terkecuali Myanmar. Perpecahan akibat isu etnis dan agama antara Budha Rakhine dan Muslim Bengali (sekarang dikenal dengan Rohingya) terjadi ketika situasi *vacuum of power* di Myanmar pada tahun 1942, dimana Jepang melakukan invasi militer ke Myanmar sehingga Inggris harus angkat kaki dari Myanmar. Inggris kemudian memindahkan kantor administrasinya ke India. Perselisihan antara penduduk Rakhine dan penduduk muslim Bengali kembali memanas pada masa ini. Kelompok pemberontak Rakhine menyerang desa-desa muslim Bengali di wilayah Rakhine selatan. Akibatnya banyak penduduk muslim Bengali di wilayah Rakhine Selatan melarikan diri ke wilayah Rakhine utara, dan melakukan pembalasan terhadap orang Rakhine yang berada di wilayah Rakhine Utara (Chan, 2005: 405).

Situasi tegang antara penduduk Rakhine dan muslim Bengali dijadikan kesempatan bagi Inggris untuk mempertahankan posisinya di Myanmar. Kantor

administrasi Inggris memang secara resmi telah dipindahkan ke India, namun tidak pada kenyataannya. Inggris menjadikan muslim Bengali (Rohingya) sebagai kaki tangannya. Inggris mempersenjatai muslim Bengali untuk ikut serta dalam operasi gerilya melawan Jepang. Namun bukannya melawan Jepang, para relawan muslim Bengali justru menghancurkan pagoda dan biara-biara Budha, serta membakar perkampungan Budha Rakhine (Chan, 2005: 406).

Ketika Jepang melakukan invasi militer ke Myanmar, Jepang mengambil alih kekuasaan Inggris atas Myanmar. Pada masa kolonial Jepang, penduduk Rakhine lebih mendapatkan tempat di pemerintahan dibanding penduduk muslim Bengali. Posisi penduduk Rakhine tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk membalas dendam terhadap penduduk muslim Bengali. Di sisi lain, langkah gerilya penduduk muslim Bengali yang menjadi kaki tangan Inggris tersebut diketahui oleh Jepang. Atas situasi ini, Jepang yang dibantu oleh penduduk Rakhine melakukan pembantaian terhadap penduduk muslim Bengali. Kejadian ini mengakibatkan banyak dari muslim Bengali yang melarikan diri ke Bangladesh. Hal inilah yang nantinya menyebabkan etnis Rohingya tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah Myanmar (Okezone, 2015).

### **2.3 Krisis Pengungsi Rohingya Setelah Merdeka**

Myanmar merayakan kemerdekaannya pada 4 Januari 1948. Setelah merdeka, terdapat kelompok-kelompok pemberontakan di Myanmar, salah satunya kelompok dari muslim Bengali (etnis Rohingya). Kelompok ini bernama MLO (*Muslim Liberation Organization*). MLO dibentuk pada tahun 1946, sebagai bentuk protes karena penduduk muslim Bengali yang melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari pembantaian kolonial Jepang, tidak diijinkan kembali ke desanya lagi di wilayah Rakhine. Beberapa bulan setelah merdeka, tepatnya pada bulan Mei 1948, MLO mengadakan konferensi dan mengubah namanya menjadi "Partai Mujahid". Setelah merdeka, tujuan Partai Mujahid adalah memisahkan diri dari Myanmar. Mereka mengumpulkan senjata yang dikumpulkan selama masa kolonial dan diletakkan di masjid di desa Fakir Bazaar dan Shahbi Bazaar (Chan, 2005: 410).

Sebelum melakukan pemberontakan secara fisik, Partai Mujahid terlebih dulu memberi peringatan kepada pemerintah Myanmar dengan mengirim surat dalam bahasa Urdu pada tanggal 9 Juni 1948. Surat tersebut berisi tuntutan Partai Mujahid, antara lain; (1) Wilayah antara *west bank* sungai Kaladan dan *east bank* sungai Naaf harus diakui sebagai daerah kekuasaan muslim Myanmar. (2) Penduduk muslim di Rakhine harus diakui sebagai penduduk negara Myanmar. (3) Partai Mujahid harus diberikan status hukum sebagai organisasi politik resmi. (4) Bahasa urdu harus diakui sebagai bahasa nasional dari muslim Rakhine dan diajarkan di sekolah-sekolah di daerah muslim. (5) Para pengungsi dari Kyauktaw dan Myohaung (Mrauk-U) harus dikembalikan ke tempat asalnya. (6) Para tahanan muslim di bawah pengawasan *Emergency Security Act* harus dibebaskan tanpa syarat. (7) Anggota Partai Mujahid harus diberikan amnesty (Chan, 2005: 411). Namun tuntutan tertulis ini diabaikan oleh pemerintah Myanmar.

Atas penolakan dari pemerintah Myanmar terhadap tuntutan yang ditawarkan oleh partai Mujahid tersebut, pada tahun 1948 partai Mujahid kemudian menyerang desa Ngapruchaung dan Maungdaw. Mereka menculik beberapa penduduk desa dan para biksu Budha untuk dimintai uang tebusan (Chan, 2005: 411). Tanggal 15 dan 16 Juni 1951, penduduk muslim Rakhine kembali mengadakan konferensi. Hasil dari konferensi tersebut adalah "*The Charter of The Constitutional Demands of The Arakani Muslims*". Piagam tersebut berbunyi antara lain; Rakhine utara harus segera dijadikan daerah otonomi yang merdeka, sejajar seperti Shan State, Karenni State, Kachin State, dan lain – lain. Keamanan berada dibawah komando Jendral Union (Chan, 2005: 412). Pada publikasi piagam inilah kata "Rohingya" pertama kali dicetuskan oleh seorang anggota parlemen dari Buthidaung yakni Abdul Gaffar, dalam artikel "The Sudeten Muslim" terbitan majalah harian *The Guardian* pada 20 Agustus 1951 (Chan, 2005: 412).

Pemilu bebas dan adil pertama di Myanmar diadakan pada tahun 1960. Empat muslim dari Buthidaung dan Maungdaw terpilih untuk duduk di kursi legislatif. Terpilih U Nu menjadi Perdana Menteri menggantikan U Aung San. Ketika muncul rencana pembentukan Rakhine State dan Mon State di parlemen,

para anggota parlemen muslim mengancam rencana tersebut dan menyerukan pembentukan Rohingya State. Situasi kembali tegang, karena sejak agenda tersebut diberlakukan, pengaruh biksu Budha semakin besar dalam urusan politik di Myanmar. Mereka memaksakan agama Budha dijadikan sebagai agama nasional (Revolusi, 2013: 5). Partai Mujahid kembali melakukan pemberontakan karena mereka dipaksa untuk belajar nilai dan budaya Budha.

Melihat situasi Myanmar yang tidak stabil, Jendral Ne Win mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962. Langkah pertama untuk menstabilkan kondisi kenegaraan ialah dengan menumpas gerakan gerilya Rohingya dan melakukan nasionalisasi perusahaan swasta pada tahun 1964 (Chan, 2005: 413). Kebijakan tersebut bertujuan untuk; pertama, menghancurkan kelompok Mujahid yang terus berusaha melakukan gerakan separatis, dan kedua yakni untuk mengambil alih aset pribadi yang dimiliki pengusaha India dan China dalam kepemilikan negara dalam bentuk perusahaan publik. Selama kurun waktu dua tahun kebijakan nasionalisasi tersebut, sekitar seratus ribu orang India dan ribuan orang Pakistan meninggalkan Myanmar. Penduduk muslim Rohingya di Rakhine utara tetap mendiami wilayah mereka, karena mereka memegang kartu registrasi nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Registrasi Nasional pasca era kolonial (Chan, 2005: 413).

Sejak Myanmar dipimpin oleh junta militer, kebijakan yang lebih mengutamakan etnis Burma atau disebut “Burmanisasi” semakin gencar dilakukan. Pemerintah menerapkan kebijakan *model village* dimana kebijakan tersebut merupakan pembangunan perumahan khusus untuk penduduk Budha Rakhine dan penduduk Budha dari daerah lainnya yang mayoritas berasal dari etnis Burma. Program pembangunan ini berkembang pesat dengan adanya bantuan dana dari Bank Dunia hingga mencapai US\$ 80 juta (Revolusi, 2013: 4). Sayangnya pembangunan tersebut dilakukan di atas tanah penduduk Rohingya yang disita secara paksa. Tempat ibadah etnis Rohingya digantikan dengan biara Budha, pagoda, dan asrama bagi para biksu Budha Rakhine. Sebagian tanah Rohingya dijadikan sebagai budidaya pertanian dan peternakan bagi etnis Burma. Sedangkan penduduk Rohingya kehilangan tanah serta mata pencaharian mereka.

Pada tahun 1973, parlemen pada masa Ne Win melakukan jajak pendapat untuk amandemen konstitusi. Penduduk Rohingya dari Mayu Frontier mengajukan proposal agar muslim di Rakhine memiliki wilayah otonomi sendiri (Chan, 2005: 413). Lagi-lagi usulan tersebut ditolak oleh pemerintah karena Rohingya tidak dianggap sebagai penduduk asli Myanmar. Kemudian pada bulan Februari 1978, pemerintah Myanmar dibawah Partai Sosialis Burma melakukan “operasi Na Ga Min” yaitu operasi militer untuk pembersihan penduduk yang ‘dianggap’ ilegal oleh junta militer Myanmar (Akbar, 2012). Akibat dari operasi militer ini, banyak penduduk Rohingya yang disiksa, ditangkap, dan dibunuh. Banyak penduduk Rohingya yang akhirnya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan dalam operasi militer ini.

Puncak dari kebijakan diskriminasi pemerintah junta militer Myanmar yakni pada tahun 1982, ketika pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kelompok etnis Rohingya tidak termasuk kedalam kelompok etnis yang diakui Myanmar sebagai warga negara (Chan, 2005: 413). Dengan adanya undang-undang ini, Rohingya diperlakukan sebagai orang asing di tempat yang telah mereka diami selama berabad-abad. Sensus penduduk tahun 1983 melaporkan tentang populasi di Rakhine, penduduk Rohingya sebanyak 24,3% dikategorikan sebagai orang Bangladesh, sedangkan penduduk Rakhine sebanyak 67,8% dikategorikan sebagai warga negara Myanmar (Chan, 2005: 413).

Undang-undang kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982 tersebut berdampak besar bagi kehidupan etnis Rohingya. Mereka semakin sulit untuk memperoleh hak-hak nya sebagai warga negara. Hal tersebut menyebabkan kesewenangan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, hingga praktik pelanggaran HAM seperti; pelecehan agama, kesulitan akses pelayanan publik, tidak memperoleh akses kesehatan, pendidikan, penganiayaan dan pemerkosaan, penarikan pajak secara sewenang – wenang, serta kehilangan tanah mereka akibat program pembangunan *model village* (Revolusi, 2013: 4). Tragedi tersebut menyebabkan banyak penduduk Rohingya yang kelaparan dan memicu arus pengungsian untuk mencari perlindungan ke negara lain. Bahkan akibat undang-

undang ini, ruang gerak etnis Rohingya benar-benar terbatas di Myanmar. Mereka dilarang untuk melakukan perjalanan bahkan dalam lingkup dalam negeri. Etnis Rohingya yang menurut pemerintah Myanmar adalah orang Bangladesh pun ditolak kehadirannya di Bangladesh, sehingga status mereka menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pada tahun 1987 Myanmar mengalami kemerosotan ekonomi. Kemudian setahun kemudian, penguasa Myanmar Jendral Sein Lwin (masih anak buah Jendral Ne Win) dengan sistem satu partainya yakni Partai Sosialis Burma dikudeta oleh SLORC (*State Law and Order Restoration Council*). SLORC ini dipimpin oleh Jendral Saw Maung. Kebijakan SLORC ini salah satunya menyangkut militerisasi etnis-etnis minoritas dengan tindakan-tindakan yang melanggar HAM, karena ideologi SLORC secara tersirat “satu bangsa, satu ras, satu agama” (Pramono, 2010: 40).

Pada tahun 1989, SLORC mengaktifkan kebijakan tentang kartu kewarganegaraan dengan menggunakan kode warna; merah muda untuk *citizens* yakni orang-orang yang dianggap sebagai pribumi, biru untuk *associate citizens* yakni orang-orang yang mengajukan kewarganegaraan berdasarkan *Union Citizenship Act* pada tahun 1948, hijau untuk *naturalized citizens* yakni orang – orang yang sudah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948. Apabila tidak termasuk kategori tersebut, maka akan diberikan kartu berwarna putih untuk *stranger* atau orang asing (HRW, 2013: 110). Masih perlakuan yang sama, pemerintah Myanmar masih belum mengakui penduduk Rohingya sebagai warga negara dengan diberikannya kartu putih kepada etnis Rohingya. Adanya sensitivitas pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya menyebabkan secara sengaja etnis Rohingya tidak diberi akses untuk mendaftarkan dirinya sebagai warga negara di Myanmar. Akhirnya etnis Rohingya selalu tidak memenuhi syarat pemerintah Myanmar untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara Myanmar.

Pada awal era 1990an, militer Myanmar meningkatkan penjagaannya di wilayah Rakhine utara secara signifikan. Mereka membangun jalan dengan memberlakukan kerja paksa, menyita harta benda, dan mengusir Rohingya ke Bangladesh secara paksa. Oknum militer juga melakukan pemerkosaan dan

penyiksaan terhadap wanita-wanita Rohingya. Masjid diubah menjadi kuil, serta kegiatan keagamaan muslim dilarang oleh pemerintah (HRW, 2013: 140). Situasi ini menyebabkan penduduk Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Pada periode pertengahan tahun 1991 hingga awal tahun 1992, ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh melewati sungai Naaf dan Cox's Bazaar (HRW, 2013: 141). Namun Bangladesh menolak kehadiran para pengungsi Rohingya tersebut dan ditempatkan di *camp* pengungsian yang kumuh. Sebagai penyelesaian konflik ini, pemerintah Myanmar dan Bangladesh membuat kesepakatan tentang repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar atas dorongan UNHCR. Perjanjian repatriasi ini ditandatangani oleh pemerintah Myanmar dan Bangladesh pada bulan April 1992 (Amnesty International, 1997: 2). Namun pada prakteknya, proses repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar tidak berjalan mulus. Pada akhir tahun 1992 hingga tahun 1993, Bangladesh mendeportasi puluhan ribu pengungsi Rohingya ke Myanmar dengan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, pada tahun 1993 pemerintah Myanmar dan Bangladesh kembali menandatangani kesepakatan dengan UNHCR terkait proses repatriasi pengungsi Rohingya. Proses repatriasi ini berada dalam pengawasan UNHCR. Atas perjanjian ini, UNHCR memiliki hak atas intervensi dalam mengatasi masalah pengungsi ini.

Kamp pengungsian di Bangladesh dijadwalkan ditutup pada April 1997. Namun pemerintah Myanmar menunda proses repatriasi ini hingga bulan Juli 1997. Dari jumlah total 21.800 pengungsi Rohingya di Bangladesh, pemerintah Myanmar hanya melakukan repatriasi terhadap 7.500 pengungsi Rohingya. Sementara sebanyak 14.300 etnis Rohingya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh (Amnesty International, 1997: 4). Untuk itu, UNHCR meminta pemerintah Bangladesh menerima pengungsi Rohingya yang masih berada di Bangladesh untuk tinggal di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh kemudian melakukan negosiasi dengan partai SLORC sebagai pihak yang berkuasa di Myanmar. Negosiasi ini terkait proses repatriasi pengungsi Rohingya, dan menghasilkan keputusan bahwa pemerintah Bangladesh memperpanjang

tenggat waktu proses repatriasi pengungsi Rohingya hingga tanggal 15 Agustus 1997 (Amnesty International, 1997: 5).

Pada kenyataannya, pada pertengahan bulan Juli 1997, Bangladesh melakukan deportasi secara paksa terhadap 399 pengungsi Rohingya (Amnesty International, 1997: 2). Sikap Bangladesh ini diketahui oleh UNHCR. Karena melanggar perjanjian, UNHCR memberi sanksi terhadap Bangladesh dengan memblokir akses pemerintah Bangladesh terhadap kamp pengungsi Rohingya di Kutupalong dan Nayapara. Selanjutnya pemerintah Bangladesh menyatakan bersedia menampung pengungsi Rohingya, namun tidak mengizinkan para pengungsi Rohingya untuk tinggal secara permanen di negaranya (Amnesty International, 1997: 2).

Pada pertengahan tahun 1997, Bangladesh kembali kedatangan etnis Rohingya. Gelombang migrasi kali ini di dominasi akibat faktor ekonomi. Harga pokok yang tinggi, kerja paksa, pemungutan pajak yang berlebihan, pembatasan hak mereka dalam berpergian, hingga penyiksaan yang dilakukan militer Myanmar mendorong etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. UNHCR kembali meminta pemerintah Bangladesh untuk menerima pengungsi Rohingya. Namun pemerintah Bangladesh menolak kehadiran gelombang baru pengungsi Rohingya (Amnesty International, 1997: 4).

Pada tahun 2012, kembali terjadi kerusuhan di wilayah Rakhine. Awal mula konflik ini akibat adanya dugaan pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Pemuda Rohingya kepada perempuan Rakhine (Muhammad, 2012: 5). Walaupun kasus ini telah ditangani secara hukum oleh pihak kepolisian, namun karena adanya sentimen kesukuan dan agama, maka kasus ini berlanjut menjadi konflik etnis. Massa dari kelompok Rakhine 'terlanjur' marah, hingga akhirnya mereka melakukan aksi pembalasan dengan membakar bus yang ditumpangi oleh mayoritas orang Rohingya. Sejak insiden pembakaran bus, situasi terus memanas hingga berujung pembakaran perkampungan Rohingya yang menyebabkan banyak orang Rohingya tewas dalam kejadian tersebut. Pasca kerusuhan ini, banyak bermunculan kelompok-kelompok perlawanan dari etnis Rohingya melalui jalur gerilya. Hal ini semakin

mengkhawatirkan pemerintah militer Myanmar karena gerakan mereka dianggap dapat mengancam keamanan negara.

Menjawab kekhawatiran pemerintah Myanmar tersebut, pada tahun 2015 pemerintah Myanmar dibawah kuasa Jendral Thein Sein mencabut efektifitas kartu putih bagi etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan etnis Rohingya tidak memiliki tanda penduduk Myanmar. Dengan tidak berlakunya kartu putih tersebut, etnis Rohingya tidak memiliki hak untuk tinggal di Myanmar. Mereka kehilangan kebebasan dalam bepergian, baik dalam negeri maupun luar negeri, karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Oleh sebab itu, etnis Rohingya mencari jalan keluar dari negara Myanmar secara diam-diam.

Ratusan ribu muslim Rohingya mencari perlindungan ke luar negeri dengan berbagai cara, baik jalur darat maupun jalur laut dengan menggunakan perahu. Awalnya mereka akan mencari suaka ke Australia, namun hingga tiga tahun terakhir belum ada kepastian dari pemerintah Australia. Kemudian mereka mencoba mencari suaka ke Thailand. Bukannya diterima sebagai pengungsi, mereka justru menjadi korban sindikat penyelundupan manusia di Thailand. Oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut, pengungsi Rohingya harus membayar hingga US\$ 1.500 per orang untuk bisa ditampung di *camp* sementara dekat perbatasan Thailand – Malaysia. Jika beruntung, mereka dapat masuk ke Malaysia dan mencari lapangan pekerjaan disana. Namun jika tidak, para pengungsi tersebut mati terbunuh oleh penjahat penyelundupan manusia (DW, 2015). Setelah berbulan – bulan terapung di laut, mereka ditolong oleh penduduk Aceh dan mendorong pemerintah Indonesia untuk membantu mereka. Akhirnya Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menampung mereka sebagai pengungsi dengan perjanjian selama satu tahun.

#### **2.4 Krisis Pengungsi Rohingya Pasca Konflik di Rakhine pada Tahun 2017**

Pada akhir bulan Agustus 2017, etnis Rohingya kembali mengalami krisis kemanusiaan dengan melakukan eksodus ke Bangladesh. Gelombang pengungsian sebanyak ratusan ribu orang ini dipicu oleh kerusuhan yang terjadi di Rakhine

yang melibatkan ARSA (*Arakan Rohingya Salvatory Army*)<sup>8</sup> dengan militer Myanmar. Akibat kerusuhan ini, banyak penduduk sipil yang menjadi korban. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2017 ini, ARSA menyerang pangkalan militer Myanmar di wilayah Rakhine. Mereka mengepung 20 pos – pos militer di wilayah perbatasan Rakhine hingga menewaskan 12 tentara (DW, 2017). Senjata yang digunakan oleh ARSA adalah pisau, tongkat, dan bom rakitan (Detik, 2017). Serangan yang dilakukan kelompok ARSA kemudian memancing militer Myanmar untuk melakukan serangan balasan. Sejak tanggal 25 hingga 30 Agustus 2017, militer Myanmar melakukan baku tembak dengan ARSA. Akibatnya sebanyak; 370 anggota ARSA, 13 tentara, dua pejabat pemerintah, dan 14 warga sipil terbunuh akibat insiden ini (DW, 2017).

Pada awal September 2017, beberapa desa yang didiami oleh etnis Rohingya mengalami kebakaran. Akibat kebakaran ini, bukan hanya etnis Rohingya yang terimbas dampaknya, namun juga kelompok etnis lain yang juga tinggal di sana. Ada dua versi berbeda mengenai peristiwa kebakaran ini. Menurut pemerintah Myanmar dan Budha Rakhine, kebakaran yang terjadi dilakukan oleh oknum Rohingya sendiri untuk memfitnah pemerintah Myanmar. Sedangkan menurut Jonathan Head<sup>9</sup> bukti bahwa penduduk Rohingya membakar rumahnya sendiri adalah rekayasa dan pembakaran perkampungan tersebut dilakukan oleh kelompok Budha Rakhine dibantu polisi Myanmar (BBC, 2017).

Total sekitar 800 ribu etnis Rohingya yang mencari suaka ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017, datang secara bertahap. Kedatangan pengungsi Rohingya pada gelombang awal pasca kerusuhan pada akhir Agustus 2017 ini ditolak oleh Bangladesh (Reuters, 2017). Mereka hanya dapat membangun tenda – tenda

---

<sup>8</sup> ARSA atau *Arakan Rohingya Salvatory Army* merupakan kelompok bersenjata yang bertujuan untuk membela, menyelamatkan, dan melindungi kelompok etnis Rohingya dari kesewenangan pemerintah Myanmar. ARSA beroperasi di daerah Rakhine, Myanmar bagian barat. Sementara menurut pemerintah Myanmar, mereka adalah kelompok militan jaringan terorisme. (Detik, 2017)

<sup>9</sup> Jonathan Head adalah seorang wartawan BBC untuk Asia Tenggara yang diberi kesempatan untuk bergabung dalam kunjungan yang diatur oleh pemerintah Myanmar ke lokasi konflik pasca kerusuhan pada akhir Agustus 2017. Dalam kunjungan tersebut pemerintah Myanmar hanya membatasi 18 wartawan lokal dan asing. Para wartawan yang ikut berpartisipasi diberi pengawasan ketat oleh pemerintah Myanmar, sehingga mereka merasa kesulitan dalam melihat lokasi dan berbincang dengan orang – orang yang terdampak di lapangan secara leluasa. (BBC, 2017)

darurat dibantu oleh penduduk Bangladesh di perbatasan Myanmar – Bangladesh, sedangkan lainnya terdampar di perbatasan Bangladesh. Hingga pada tanggal 1 September 2017, ditemukan 23 jenazah etnis Rohingya di pantai Bangladesh. Jenazah-jenazah tersebut ditemukan tewas setelah perahu yang mereka gunakan untuk mencari suaka ke Bangladesh tenggelam (Reuters, 2017).

Sebagai negara yang paling mudah dijangkau oleh pengungsi Rohingya, bukan pertama kali Bangladesh menjadi negara utama tujuan etnis Rohingya dalam mencari perlindungan. Bangladesh telah menampung sekitar 400 ribu etnis Rohingya akibat konflik yang terjadi sebelumnya. Untuk itu Bangladesh menolak kehadiran pengungsi Rohingya. Militer Bangladesh memperketat penjagaan wilayah perbatasannya. Bahkan untuk mencegah datangnya pengungsi baru tersebut, pemerintah Bangladesh melakukan penangkapan terhadap pengungsi Rohingya yang memaksa masuk ke Bangladesh untuk kemudian dikembalikan ke Myanmar. Padahal situasi di Myanmar masih dalam keadaan tegang (Reuters, 2017).

Konflik yang terjadi pada bulan Agustus 2017 di Rakhine menyebabkan krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Selain banyak memakan korban jiwa, konflik ini menimbulkan permasalahan kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Kehilangan tempat tinggal, kehilangan rasa aman, kelaparan, dan kehilangan akses kesehatan, tidak dapat mereka hindari. Terlebih pasca kerusuhan ini, pemerintah Myanmar justru memblokir akses bagi pihak asing, bahkan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Atas sikap pemerintah Myanmar ini, pihak asing tidak dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh korban konflik. Selain itu, pemerintah Myanmar yang membatasi media, baik media lokal maupun media asing, menyebabkan masyarakat internasional tidak mengetahui secara pasti kebutuhan para korban konflik (Kompas, 2017).

Konflik kekerasan yang terjadi di Rakhine pada bulan Agustus 2017 mengundang perhatian masyarakat internasional. Pasca kejadian ini, Dewan HAM PBB mengirimkan Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB untuk mencari informasi terkait konflik yang terjadi di Rakhine (Kompas, 2017). Nampaknya keputusan

Dewan HAM PBB untuk mengirimkan Tim Pencari Fakta ini akibat adanya dugaan adanya praktik genosida di negara tersebut. Tindak kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh militer Myanmar memunculkan dugaan akan adanya niatan pemerintah Myanmar untuk membersihkan etnis Rohingya. Untuk itu, Dewan HAM PBB memerintahkan Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB yang dibentuk pada bulan Maret 2017, untuk menyelidiki adanya bukti terkait adanya praktik genosida terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine. Namun pemerintah Myanmar melalui duta besar Myanmar untuk PBB yakni Htin Lynn, tidak memberikan akses masuk kepada Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB. Menurut pemerintah Myanmar, operasi militer yang dilakukan hanya untuk membersihkan kelompok teroris yang membahayakan negaranya (BBC, 2017).

Dugaan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya semakin kuat dengan ditemukannya lima kuburan massal di desa yang berbeda di wilayah Rakhine, sejak 19 Desember 2017. Lima lubang besar yang ditemukan tersebut merupakan kuburan massal etnis Rohingya. Mayat di dalam lima kuburan massal tersebut diketahui merupakan etnis Rohingya ketika adanya pengakuan dari militer Myanmar. Militer Myanmar menyatakan bertanggung jawab kuburan massal yang berisi 10 mayat etnis Rohingya tersebut. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada September 2017. Mereka dibunuh oleh oknum militer Myanmar dengan alasan karena mereka adalah kelompok teroris yang berbahaya (Kompas, 2017).

Aksi pembunuhan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kehilangan rasa aman hingga menyebabkan eksodus etnis Rohingya, menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Padahal, hak asasi manusia merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Konteks HAM pun secara universal juga diterima oleh masyarakat internasional, sehingga adanya kasus pelanggaran HAM mampu menarik perhatian masyarakat Internasional. Perhatian masyarakat Internasional terhadap kasus ini bermacam-macam, mulai dari kecaman yang memojokkan pemerintah Myanmar hingga adanya ancaman embargo terhadap

pemerintah Myanmar. Respon dari masyarakat internasional tersebut datang dari segala arah, baik negara maupun organisasi internasional.

Respon dari organisasi internasional terhadap kasus ini, bukan hanya datang dari PBB sebagai organisasi yang menaungi bangsa-bangsa di dunia dan ASEAN sebagai organisasi induk di wilayah Asia Tenggara, namun juga datang dari organisasi negara-negara dengan mayoritas penganut agama Islam yakni OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Seperti yang kita tahu bahwa Myanmar adalah negara dengan mayoritas penganut Budha, respon OKI dan sikap yang dilakukan organisasi Islam ini merupakan upaya dalam membantu etnis Rohingya sebagai sesama umat Muslim. Selain itu, respon dari negara-negara lain terkait kasus ini bukan hanya berasal dari negara-negara tetangga Myanmar namun juga negara-negara barat. Respon dari masyarakat internasional ini tidak lain bertujuan agar krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya bisa segera diselesaikan.

## **BAB 3. ALASAN INDONESIA TERLIBAT DALAM PENYELESAIAN KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA**

Ada tiga alasan Indonesia terlibat dalam penyelesaian krisis pengungsi Rohingya. Alasan tersebut meliputi; pertama, karena Indonesia adalah negara yang dipercaya oleh Myanmar. Kedua, karena hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar, serta adanya kesamaan antara Indonesia dan Myanmar. Dan ketiga, karena langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya termasuk dalam agenda strategis politik luar negeri Indonesia.

### **3.1 Indonesia adalah Negara yang Dipercaya oleh Myanmar**

Etnis Rohingya mengalami krisis kemanusiaan di negaranya sendiri sejak lama. Namun masyarakat Internasional nampaknya sedikit terlambat dalam memberi perhatian terhadap penanganan kasus ini. Kesulitan dalam hal akses masuk ke Myanmar, menjadi salah satu faktor pihak asing sulit mendapatkan informasi tentang konflik yang terjadi di Myanmar hingga menyebabkan krisis kemanusiaan. Pada tahun 2017 etnis Rohingya kembali mengalami krisis pengungsian. Krisis ini bermula pada tanggal 25 Agustus 2017, dimana terjadi peristiwa kerusuhan di Rakhine yang melibatkan kelompok ARSA dengan militer Myanmar. Banyak respon yang diterima pemerintah Myanmar, baik berupa kecaman yang menyalahkan pemerintah Myanmar hingga ancaman embargo. Pasalnya konflik ini menyebabkan ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke luar negara Myanmar. Namun Bangladesh sebagai negara tujuan para pengungsi ini tidak bersedia memberi perlindungan kepada mereka. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, krisis pangan, tanpa jaminan kesehatan, dan anak-anak kehilangan akses pendidikan. Akibatnya, konflik ini menuai respon dari masyarakat internasional. Namun sayangnya respon dan sikap yang diberikan masyarakat internasional tidak tepat sasaran dan kurang tanggap dalam menangani kasus ini. Respon dari masyarakat internasional terhadap kasus ini diantaranya;

### 3.1.1 Respon Organisasi Internasional Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya

#### 3.1.1.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pasca Perang Dunia II, terciptanya dunia yang aman dan damai merupakan cita-cita segala bangsa dan negara di dunia. Untuk itulah, PBB sebagai sebuah organisasi antar negara-negara di dunia, memiliki niat baik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam rangka tersebut, PBB menyatakan dengan jelas di dalam *Universal Declaration of Human Right* yang disahkan pada tahun 1948, bahwa setiap orang di dunia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia yang terlahir merdeka. Berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 yang merujuk pada Konvensi PBB tahun 1948 yang membahas mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebenarnya rentetan peristiwa yang dialami oleh etnis Rohingya bisa dikatakan memenuhi kriteria pembersihan etnis atau genosida. Pasal di dalam Statuta Roma tahun 1998 tersebut mengatakan bahwa genosida merupakan tindakan yang bertujuan untuk; menghancurkan sebuah bangsa, etnis, ras, maupun agama, yang cara pelaksanaannya bisa dengan membunuh atau membatasi hak dan kebebasan mereka (Abidin dan Eddyono, 2017: 3). Dalam hal ini, maka sebenarnya Dewan Keamanan (DK) PBB memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya praktik genosida dengan cara membuat resolusi. Mekanisme lahirnya sebuah resolusi diperoleh dan bisa dilaksanakan apabila mendapat kesepakatan dari minimal sembilan negara dari total keseluruhan 15 negara anggota DK PBB (Tirto, 2017). Dalam upaya menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya, PBB secara kelembagaan dan prosedural tercatat mengeluarkan dua kali resolusi. Pertama pada 12 Januari 2007, dan kedua pada 26 Maret 2017 (Tirto, 2017). Namun sayangnya resolusi yang dikeluarkan PBB tersebut belum mampu mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

Resolusi PBB tahun 2007 tentang pemberian perhatian khusus terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine dikatakan gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. China dan Rusia menggunakan hak veto-nya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menyebabkan status resolusi ini diblokir. Alasan China dan Rusia tidak menyetujui resolusi ini antara lain karena permasalahan tersebut dianggap

merupakan konflik internal Myanmar dan tidak tepat apabila isu tersebut diatasi oleh Dewan Keamanan PBB (Tirto, 2017).

Sedangkan resolusi PBB tahun 2017 tentang Tim Pencari Fakta di Rakhine ditolak oleh otoritas Myanmar sebagai negara yang berdaulat, karena kehadiran Tim Pencari Fakta PBB nantinya dianggap justru akan memeperkeruh situasi. Hal ini menyebabkan UNHCR (yang diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk melaksanakan resolusi ini) menjadi terhambat dalam melaksanakan resolusi. Karena bagaimana pun, berdasarkan Piagam PBB Pasal 1 Ayat 2 poin 7, PBB dilarang untuk mengintervensi kedaulatan suatu negara. Sebuah resolusi yang dikeluarkan PBB dapat dilakukan atau tidak, apabila mendapat ijin dari negara yang bersangkutan (Tirto, 2017).

#### 3.1.1.2 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

Tragedi yang terjadi di Myanmar boleh saja mereka anggap sebagai konflik dalam negeri mereka sendiri. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah ketika gelombang pengungsi dengan jumlah ratusan ribu orang, tersebar di sejumlah negara tetangga Myanmar. Kasus ini menjadi isu kemanusiaan yang serius dan mempengaruhi dinamika politik kawasan di Asia Tenggara. Bukan hanya pengungsi, isu yang berkembang kemudian menjadi perdagangan manusia, kerja paksa, buruh anak, bahkan isu terorisme. ASEAN, sebagai organisasi induk di kawasan Asian Tenggara seharusnya bisa menjadi yang terdepan dalam mengatasi kasus ini. Namun nampaknya langkah ASEAN untuk menjadi inisiator dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar hingga menyebabkan krisis kemanusiaan etnis Rohingya terhambat oleh prinsip non intervensi ASEAN. Apa yang terjadi di Myanmar sebenarnya dapat dijadikan momentum untuk merefleksikan apakah prinsip non intervensi ASEAN masih relevan dewasa ini, terlebih terkait krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya pasca kerusuhan di Rakhine pada 25 Agustus 2017.

Ada perbedaan pendapat antar negara-negara anggota ASEAN dalam memandang krisis Rohingya, terkait prinsip non intervensi ASEAN. Dari sepuluh negara ASEAN, hanya Indonesia dan Malaysia yang menginginkan ASEAN turun

tangan untuk membantu mengatasi kasus ini. Sedangkan Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam merupakan negara-negara yang tetap berpegang terhadap prinsip non intervensi ASEAN. Sementara Filipina dan Brunei Darussalam abstain (Sindonews, 2017). Dari keputusan negara-negara yang berada di pihak Myanmar untuk tidak ikut campur dalam kasus ini, beberapa alasannya karena sebenarnya setiap negara ingin melindungi kepentingan jangka panjang negaranya sendiri. Seperti misal Thailand, pemerintahan Thailand saat ini masih didominasi oleh junta militer. Terdapat sanksi berat bagi orang-orang yang berani mengutarakan pendapat apalagi kritik kepada kerajaan. Begitu pula Kamboja, dimana negara tersebut masih ada problem politik dalam negeri mereka. Sedangkan Laos dan Vietnam sendiri masih merupakan negara sosialis (Sindonews, 2017). Dengan mayoritas negara anggota ASEAN yang masih bersikukuh dengan prinsip non intervensi ASEAN, hal ini menandakan bahwa prinsip non intervensi ASEAN masih dipertahankan hingga saat ini untuk melindungi kepentingan politik masing-masing negara anggotanya. Prinsip non intervensi ini diwujudkan dengan tidak adanya respon apapun dari ASEAN secara kelembagaan mengenai krisis kemanusiaan etnis Rohingya pasca kerusuhan di Rakhine pada 25 Agustus 2017. Bahkan pada perhelatan besar semacam KTT ASEAN ke-31 yang diselenggarakan pada 10-11 November 2017 di Filipina, isu Rohingya tidak dibahas dalam agenda rapat tersebut.

Pengaruh ASEAN sebenarnya sangat besar apabila ASEAN secara kelembagaan berupaya secara aktif untuk membantu menangani krisis kemanusiaan etnis Rohingya, dengan kekuatannya sebagai organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sejauh ini termasuk kategori organisasi regional yang sukses di dunia selain Uni Eropa (Yumitro, 2017: 93). Namun sikap ASEAN yang seakan lepas tangan akan isu kemanusiaan ini menyebabkan ASEAN mendapat desakan dari PBB maupun masyarakat internasional lain. Padahal apabila mengacu pada Deklarasi Bangkok yang ingin menciptakan kawasan ASEAN yang damai dan stabil (ASEAN, 2016), ASEAN memiliki dasar untuk membawa isu kemanusiaan etnis Rohingya ke level regional.

### 3.1.1.3 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Organisasi Kerjasama Islam yang dulu bernama Organisasi Konferensi Islam adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara yang mayoritas beragama Islam pada tahun 1969. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai media komunikasi untuk meningkatkan solidaritas antar negara anggota, menjalin kerjasama, menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, dan melindungi tempat-tempat suci umat Islam (Kemlu, 2014). Pada level organisasi Internasional semacam OKI, isu Rohingya kerap kali dijadikan agenda pembahasan pada forum konferensinya. Bukan hanya memerhatikan negara-negara anggotanya, OKI juga memerhatikan negara-negara yang bukan anggotanya. Hal tersebut didasari pada resolusi OKI no. 1/39-MM tentang *Safeguarding The Rights of Muslim Communities dan Minorities in Non OIC member State*, yang menyerukan negara-negara anggota OKI untuk memberi bantuan kepada masyarakat muslim minoritas di negara-negara non-anggota OKI (Dewinta, 2016: 129).

Sebagai satu – satunya organisasi yang mewakili umat muslim di dunia, OKI merasa bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya akibat kekerasan yang terjadi di Rakhine. Sejak tahun 2000, OKI mengeluarkan resolusi dengan tujuan agar krisis kemanusiaan yang di alami oleh etnis Rohingya dapat segera diakhiri, dan di tahun-tahun setelahnya secara berkala negara-negara anggota OKI melakukan pembahasan mengenai rancangan resolusi terkait isu Rohingya (Kemlu, 2017). Namun sayangnya resolusi tersebut tidak berpengaruh bagi pemerintah Myanmar, hingga tahun 2017 konflik antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya masih saja terjadi.

Dalam upaya menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya pasca konflik di Rakhine pada akhir Agustus 2017, OKI mendesak pemerintah Myanmar agar bersedia menerima tawaran OKI untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya. Pada KTT OKI tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diselenggarakan di Kazakhstan pada tanggal 10 September 2017, isu Rohingya menjadi bahasan dalam agenda forum atas dorongan dari Turki,

Indonesia, Arab Saudi, dan Malaysia. Pada sela Sidang Umum PBB ke-72 pada 19 sampai 25 September 2017 di New York, para pemimpin negara anggota OKI mengadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut mengenai krisis Rohingya. Selain dihadiri oleh negara -negara anggota OKI, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pihak-pihak lain selain anggota OKI, seperti UNHCR, PBB, Inggris, dan Amerika Serikat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk terus memantau kondisi di Rakhine dan berusaha membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah Myanmar agar kekerasan di Rakhine yang menyebabkan etnis Rohingya menderita bisa dihentikan, serta terus meminta dukungan masyarakat internasional mengenai krisis kemanusiaan ini. Selain upaya tersebut, OKI juga sepakat untuk mengirimkan bantuan logistik bagi pengungsi Rohingya (Kumparan, 2017).

#### 3.1.1.4 Uni Eropa

Kerugian yang diakibatkan Perang Dunia II membawa traumatik dan perpecahan dimana-mana. Uni Eropa, dimana hampir seluruh negara anggotanya ikut andil dalam Perang Dunia II, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan PBB pada tahun 1948 memiliki arti yang sangat penting bagi negara-negara di Eropa. Sejauh ini, Uni Eropa merupakan organisasi berbasis regional terkuat di dunia. Sebagai salah satu organisasi adidaya di dunia, Uni Eropa memiliki power untuk melaksanakan komitmennya dalam mempromosikan, melindungi, dan membela orang – orang yang sedang berjuang memperoleh hak-haknya sebagai manusia universal (EEAS, 2017).

Sebagai bukti komitmennya terhadap salah satu misi Uni Eropa yakni mempromosikan dan melindungi HAM, Uni Eropa ikut andil dalam mengatasi kasus yang terjadi di Myanmar. Sanksi pertama kali yang dijatuhkan kepada Myanmar dari dunia Internasional datang dari Uni Eropa. Embargo terhadap Myanmar pertama kali dilakukan oleh Uni Eropa pada tahun 1991 (Pramono, 2014: 138). Sikap Uni Eropa tersebut sebagai upaya demokratisasi Myanmar yang tidak kunjung terealisasi dan sanksi terhadap kekerasan pemerintah junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Embargo yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap

Myanmar berupa embargo pengiriman senjata ke Myanmar dan embargo ekonomi yakni pelarangan investasi bagi sejumlah perusahaan asal Uni Eropa (Pramono, 2014: 138). Kemudian embargo ekonomi yang diberlakukan Uni Eropa akhirnya dicabut pada bulan April 2012 sebagai upaya membangun kembali relasi Uni Eropa dengan Myanmar yang sempat merenggang (DW, 2013).

Pasca konflik di Rakhine pada 25 Agustus 2017, Uni Eropa adalah salah satu pihak yang kecewa terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine. Namun dalam perjalanannya, respon Uni Eropa nampaknya menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Negara-negara barat, termasuk Uni Eropa, sepakat bahwa krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya adalah tanggung jawab militer Myanmar, khususnya para pejabat militer Myanmar (Kumparan, 2017). Untuk itu, pada bulan Oktober 2017 Uni Eropa mengancam Myanmar dengan rencana untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat militer Myanmar yang disinyalir bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di Rakhine hingga menyebabkan penderitaan bagi etnis Rohingya. Uni Eropa baru secara langsung mengunjungi lokasi konflik di Myanmar pada bulan November 2017, yang diwakili oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini. Pertemuan tersebut untuk membicarakan upaya yang bisa dilakukan untuk mengakhiri krisis Rohingya dengan otoritas Myanmar. Namun dalam kunjungan diplomatik tersebut Federica Mogherini juga menyampaikan bahwa negosiasi melalui pendekatan terhadap pemerintah Myanmar lebih efektif dilakukan daripada melakukan penekanan (Detik, 2017). Padahal sebelumnya Uni Eropa mengancam Myanmar dengan akan menjatuhkan embargo terhadap Myanmar.

Selain sikap Uni Eropa yang tidak konsisten, Embargo Ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa kepada Myanmar tidak berpengaruh banyak bagi Myanmar. Walaupun negara-negara barat menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Myanmar dan menjauhi Myanmar, Myanmar tidak merasa khawatir karena China masih membuka tangan lebar terhadap Myanmar. Terlebih, investasi Uni Eropa di Myanmar tidak sebanding dengan investasi China yang saat ini masih menduduki posisi teratas di Myanmar (Tirto, 2017).

### 3.1.1.5 Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch (HRW) adalah sebuah organisasi non profit yang bergerak di bidang hak asasi manusia dalam cakupan lingkup internasional. Organisasi swadaya ini bersifat independen dengan tidak menerima dana dari pemerintah. Organisasi ini awalnya bernama Helsinki Watch dan mulai beroperasi pada tahun 1978, dengan tujuan untuk mengawasi Uni Soviet beserta negara-negara sekutunya terhadap perjanjian Helsinki yang berkenaan dengan ketentuan hak asasi manusia. Pada tahun 1988 nama Human Rights Watch (HRW) baru resmi digunakan dan dikenal sebagai organisasi kemanusiaan terbesar yang berbasis di Amerika Serikat (Ula, 2017: 21).

Misi HRW adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia, tanpa memandang kelas sosial, agama, etnis, dan perbedaan lainnya. HRW juga bertujuan untuk memberi dukungan terhadap korban diskriminasi dan melindungi individu dari tindakan yang melanggar nilai – nilai kemanusiaan. Dalam menjalankan misinya, organisasi ini berpegang pada penerapan *Responsibility to Protect* untuk menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah negara (Ula, 2017: 21).

Untuk mencapai tujuan HRW, organisasi ini biasanya memiliki prosedurnya tersendiri. HRW biasanya melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi, membuat laporan terkait informasi yang diperoleh, dan terakhir adalah melakukan advokasi (Ula, 2017: 22). Peneliti HRW melakukan tugasnya secara konsisten dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan melakukan penelitian berbasis lapangan. Nantinya informasi tersebut dianalisis dan dijadikan sebuah laporan. Laporan tersebut nantinya yang akan dijadikan penguat pada proses advokasi. Begitu pula terkait krisis Rohingya, HRW melakukan prosedur yang sama. Beberapa peneliti HRW secara permanen ditempatkan di dekat wilayah konflik dengan tujuan agar dengan mudah mendapatkan informasi di lapangan, melakukan wawancara dengan korban dan saksi. Informasi tersebut nantinya dianalisis dan dibuat laporan khusus. Walaupun laporan yang dikeluarkan oleh HRW tersebut dibantah oleh Myanmar, namun laporan tersebut menemukan bukti – bukti adanya kejahatan berupa pemaksaan pemindahan populasi, pembunuhan, pemerkosaan, serta pelecehan seksual. Proses advokasi yang dilakukan HRW tersebut dengan cara

memberi tekanannya terhadap pemerintah Myanmar melalui laporan yang dikeluarkan HRW. HRW mendesak pemerintah Myanmar dan militer Myanmar untuk segera membuka akses bagi Tim Pencari Fakta PBB dan bantuan kemanusiaan sebagai langkah memperjuangkan keadilan etnis Rohingya (Ula, 2017: 22).

Di level internasional, HRW mendesak PBB untuk segera melakukan tindakan agar krisis kemanusiaan etnis Rohingya segera berakhir. Pada bulan September 2017, menjelang Sidang Umum PBB, HRW mendesak DK PBB dan negara-negara besar untuk menjatuhkan embargo senjata terhadap Myanmar (CNN, 2017). HRW juga mendesak ASEAN agar kasus kemanusiaan ini dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang akan dilaksanakan pada bulan November 2017 (HRW, 2017).

### 3.1.2 Respon Negara-Negara Lain Terhadap Krisis Rohingya

#### 3.1.2.1 Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara ASEAN (bersama Indonesia) yang mendesak ASEAN melakukan tindakan dalam mengatasi krisis Rohingya pasca konflik di Rakhine pada bulan Agustus 2017. Malaysia mengecam aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya pada bulan Agustus 2017. Kecaman tersebut dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia melalui duta besar Myanmar di Malaysia. Malaysia juga mendesak militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Pasca konflik di Rakhine sejak tanggal 25 Agustus 2017, etnis Rohingya tidak hanya mencari suaka ke Bangladesh namun juga ke Malaysia. Sekitar 60 ribu etnis Rohingya tiba di Malaysia, namun kehadirannya ditolak oleh Malaysia. Malaysia melalui Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan jika Malaysia tidak ingin menjadi negara tujuan pengungsi setiap terjadi kerusuhan di Myanmar. Pasca kerusuhan tersebut Malaysia juga melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Myanmar (Detik, 2017).

Sikap Malaysia yang mengecam dan terkesan menyalahkan pemerintah Myanmar nampaknya bukanlah tindakan solutif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Hal ini justru membuat hubungan antara kedua negara tersebut

merenggang. Terlebih adanya catatan buruk hubungan antara kedua negara ini, ketika Myanmar menjadi tuan rumah bagi pengungsi Rohingya pada konflik tahun 2016. Myanmar pernah mengecam Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 20 Januari 2017. Menurut pemerintah Myanmar, krisis Rohingya dimanfaatkan oleh kepentingan politik Najib Razak untuk meningkatkan kredibilitasnya setelah tersandung kasus dugaan korupsi (Kompas, 2017). Kecaman tersebut berawal dari seruan Najib Razak untuk membahas isu krisis kemanusiaan Rohingya pada KTT OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Kuala Lumpur tanggal 19 Januari 2017, terkait adanya dugaan praktik genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Respon Myanmar ialah menolak bahwa pemerintah Myanmar melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya dan juga menolak isu Rohingya untuk dibahas di KTT OKI 2017 dengan alasan bahwa Myanmar bukan anggota OKI karena mayoritas masyarakatnya yang beragama Budha. Pemerintah Myanmar juga mengecam bahwa Najib Razak ikut menyebarkan berita bohong terkait krisis Rohingya (Kompas, 2017).

### 3.1.2.2 Turki

Turki merupakan salah satu negara muslim yang juga aktif dalam membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar pasca pecah konflik di Rakhine pada 25 Agustus 2017. Dalam menanggapi krisis kemanusiaan etnis Rohingya ini, Turki adalah salah satu negara yang vokal untuk menyelesaikan kasus ini. Sikap Turki tersebut dilatar belakangi karena adanya rasa empati terhadap sesama warga muslim, dan juga Turki merasa memiliki beban moral, dimana saat ini Turki menjabat sebagai ketua Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Upaya Turki dalam membantu menyelesaikan krisis Rohingya pasca konflik tahun 2017 antara lain dengan melakukan desakan terhadap masyarakat Internasional terutama negara – negara muslim, dan melakukan negosiasi dengan Bangladesh terkait pengungsi Rohingya. Turki sangat geram dengan tindak kekerasan militer Myanmar yang dilakukan terhadap etnis Rohingya, hingga banyak memakan korban jiwa dan melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak negara – negara muslim untuk membantu menemukan solusi bagi krisis Rohingya. Presiden Erdogan melakukan dialog dengan empat negara muslim; Pakistan, Iran, Mauritania, dan Qatar, melalui via telepon (Republika, 2017). Namun nampaknya tidak ada tindakan lebih lanjut secara kongkrit dari negara – negara tersebut. Pada tanggal 2 September 2017 Turki melalui Menteri Luar Negeri Mevlur Cavusoglu bahkan mengecam negara – negara muslim karena dianggap tidak peduli terhadap apa yang terjadi pada muslim Rohingya di Myanmar (Sindonews, 2017). Turki yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Cavusoglu, melakukan kunjungan diplomatik ke Bangladesh pada tanggal 6 September 2017 dan pada tanggal 7 September 2017 dijadwalkan melakukan negosiasi mengenai krisis pengungsi Rohingya dengan pemerintah Bangladesh (Detik, 2017). Turki mendesak pemerintah Bangladesh untuk memberi perlindungan kepada pengungsi Rohingya, dan menjanjikan akan memberikan bantuan finansial kepada pemerintah Bangladesh apabila Bangladesh bersedia membuka pintunya bagi pengungsi Rohingya (VOA, 2017).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersikukuh menyebut apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan sebuah kejahatan pembersihan etnis atau genosida (Detik, 2017). Oleh sebab itu, pemberian bantuan kemanusiaan saja bagi Turki dinilai tidak cukup untuk menghentikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya tersebut. Pada level internasional, Turki adalah salah satu negara yang mendesak agar kasus kemanusiaan ini dibahas pada pertemuan OKI, sidang umum PBB pada pertengahan September 2017, Dewan Penasihat Rohingya, Organisasi Internasional, dan dibicarakan dengan pemimpin-pemimpin negara lain (Sindonews, 2017). Sementara dengan Myanmar, Turki melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar melalui telepon pada tanggal 5 September 2017 (Detik, 2017). Turki mendesak pemerintah Myanmar agar segera menghentikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.

Sebenarnya langkah diplomasi Turki sudah tepat, hanya saja tidak adanya ikatan emosional antara kedua negara dan sikap Turki yang seakan berat sebelah, dalam artian hanya memihak etnis Rohingya menyebabkan upaya yang dilakukan

Turki seakan 'hambar' bagi pemerintah Myanmar. Pemerintah Turki hanya mendesak masyarakat internasional, namun tidak melakukan pendekatan secara intensif dengan pemerintah Myanmar. Padahal kunci utama penyelesaian masalah ini ada di tangan pemerintah Myanmar.

### 3.1.2.3 Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu negara barat yang mengecam aksi kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Keterlibatan Amerika Serikat di Myanmar bermula ketika junta militer Myanmar dianggap menjadi penghambat bagi proses demokratisasi di Myanmar. Maka pada tahun 1997 Presiden Bill Clinton menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Myanmar, dengan menerapkan larangan investasi bagi warga Amerika Serikat di Myanmar. Tahun 2003 pemerintah junta militer Myanmar melakukan serangan terhadap partai NLD yang pro demokrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi. Kemudian di tahun yang sama, setelah kejadian tersebut, Presiden George W Bush kembali memberlakukan sanksi terhadap Myanmar dengan mengeluarkan pelarangan ekspor impor ke Myanmar, serta membekukan aset partai militer Myanmar yakni SPDC dan tiga lembaga keuangan perdagangan luar negeri Myanmar. Pada bulan September 2007, terjadi aksi unjuk rasa kontra junta militer Myanmar. Tindakan keras militer Myanmar untuk menumpas gerakan tersebut berakibat pada semakin merenggangnya hubungan Amerika Serikat dengan Myanmar. Sebagai tindakan atas kerusakan tersebut, pada tanggal 27 September 2007, Departemen Keuangan Amerika Serikat memblokir semua aset pejabat junta militer Myanmar yang ada di Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan melakukan korupsi (Anggara, 2014: 4). Namun sanksi-sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat tersebut tidak pernah berhasil untuk menghentikan kekerasan junta militer Myanmar. Ketika Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi dan menjauh dari Myanmar, perdagangan ekspor impor Myanmar dengan Thailand, India, dan China justru menunjukkan angka peningkatan (BBC, 2010).

Baru satu tahun Amerika Serikat mencabut embargonya terhadap pemerintah Myanmar, tepatnya pada bulan Oktober 2016, Myanmar kembali bergejolak (CNN, 2016). Pasca konflik yang terjadi di Rakhine pada 25 Agustus 2017 antara militer Myanmar dan etnis Rohingya, Amerika Serikat kembali mengancam pemerintah Myanmar dengan seruan embargo senjata terhadap Myanmar. Pada tanggal 29 September 2017 Amerika Serikat yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, menyerukan masyarakat internasional untuk tidak memasok senjata ke Myanmar. Hal tersebut sebagai hukuman bagi militer Myanmar atas tindakan kekerasan di Rakhine dan adanya dugaan pembersihan etnis Rohingya (Sindonews, 2017).

Amerika Serikat melakukan gertakan yang cukup keras kepada pemerintah Myanmar. Bukan hanya mundur dari dewan penasihat Rohingya, Amerika Serikat juga akan menarik bantuan militer Myanmar. Pernyataan ini dikemukakan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 25 Oktober 2017 (Sindonews, 2017). Selain militer Myanmar, Amerika Serikat juga mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada beberapa pemimpin milisi Budha di Rakhine, karena dianggap sebagai provokator terhadap pembakaran perkampungan tempat tinggal etnis Rohingya (Kumparan, 2017). Kemudian pada tanggal 22 Desember 2017, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi bagi oknum Myanmar yang menurut Amerika Serikat telah terbukti melakukan pelanggaran HAM dan melakukan korupsi. Jendral Maung Maung Soe disinyalir sebagai penanggung jawab operasi militer yang terjadi di Rakhine pada 25 Agustus 2017. Sanksi yang ditetapkan tersebut berdasarkan Undang-Undang Global Magnitsky yang disahkan Kongres pada tahun 2012. Pihak-pihak yang terkena sanksi tersebut seluruh asetnya yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat akan diblokir. Amerika Serikat juga akan mengisolasi akses oknum tersebut dari sistem keuangan global (CNN, 2017). Ancaman sanksi dan sikap Amerika Serikat yang menjauhi Myanmar, dengan harapan agar Myanmar segera menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya, nyatanya justru semakin menciptakan kerenggangan hubungan antara keduanya. Penggunaan *hard power* yang dilakukan Amerika Serikat dirasa kurang relevan dalam menyelesaikan kasus kemanusiaan ini.

#### 3.1.2.4 Inggris

Hubungan Inggris dengan Myanmar baru memasuki babak baru pada tahun 2012 yang sempat merenggang akibat pemerintah junta militer Myanmar. Sebagai negara bekas jajahannya, Inggris melalui Menteri Luar Negeri Inggris William Hague kembali mengunjungi Myanmar pada awal Januari 2012 sebagai apresiasi terhadap pemerintah Myanmar atas perubahan Myanmar menuju arah demokrasi (Kompas, 2012). Sejak saat itu, hubungan bilateral Inggris dan Myanmar semakin membaik. Kedua negara ini banyak melakukan kerjasama, baik kerjasama ekonomi maupun militer. Pada tahun 2016, Inggris memberi bantuan militer kepada Myanmar berupa berbagai macam pelatihan (Jawapos, 2017). Pemerintah Inggris memberikan pelatihan keahlian yang berfokus pada bahasa, pemerintahan, akuntabilitas, etika, hak asasi manusia, dan hukum internasional kepada militer Myanmar (Detik, 2017). Program pelatihan ditujukan sebagai upaya pengembangan militer Myanmar menuju arah demokrasi yang lebih baik.

Konflik yang kembali terjadi di Rakhine akibat tindak kekerasan militer Myanmar kepada etnis Rohingya pada bulan Agustus 2017 menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat Internasional. Kekhawatiran mendalam atas pelanggaran HAM di Rakhine tersebut juga disampaikan oleh Inggris melalui Perdana Menteri Inggris Theresa May. Sebagai respon atas konflik kekerasan di Rakhine tersebut, pada tanggal 20 September 2017 pemerintah Inggris menghentikan pelatihan militer Myanmar sebagai wujud kecaman pihak otoritas Inggris terhadap kekerasan di Rakhine. Penghentian pelatihan militer Myanmar tersebut sekaligus menjadi seruan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan di Rakhine dan menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat sipil tanpa memandang suku, agama, maupun ras tertentu. Sikap pemerintah Inggris tersebut juga seruan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya (Detik, 2017).

Sikap Inggris dengan menanggukkan pelatihan militer Myanmar ini nampaknya berhubungan dengan kepentingan politis Inggris. Inggris ingin melindungi kredibilitas negaranya agar tidak disebut-sebut sebagai fasilitator bagi militer Myanmar, berhubung pelatihan militer Myanmar berasal dari militer Inggris. Selain itu, sebagai negara bekas penjajah Myanmar, Inggris sebenarnya bisa menjadi saksi kunci atas konflik komunal yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya. Inggris sebagai negara bekas penjajah Myanmar pasti memiliki dokumen penting mengenai data sejarah etnis Rohingya. Dengan membuka kembali dokumen penting Myanmar terkait etnis Rohingya di Inggris, diharapkan menjadi titik terang bagi penyelesaian konflik komunal antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya, sehingga krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya dapat diakhiri.

#### 3.1.2.5 China

China merupakan negara yang berada di pihak pemerintah Myanmar. Dalam sejarahnya, Myanmar memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat dengan China. Selain adanya kesamaan ras antara mayoritas masyarakat Myanmar dengan masyarakat China, hubungan baik yang terjalin antara kedua negara ini tidak lepas karena adanya kesamaan ideologi yang pernah dianut oleh kedua negara yakni sosialis. Berbeda dari sikap mayoritas masyarakat internasional mengenai demokratisasi Myanmar yang tak kunjung terealisasi, China justru merupakan negara yang menentang upaya demokratisasi di Myanmar (Sindonews, 2017). Myanmar menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara terkait hubungan ekonomi, dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Berdasarkan *Observatory of Economic Complexity*, pada tahun 2015 tujuan ekspor Myanmar paling banyak adalah China (5,03 miliar dolar), dan diikuti oleh Thailand (3,27 miliar dolar), India (963 juta dolar), Jepang (858 juta dolar), dan Korea Selatan (504 juta dolar). Sedangkan Impor Myanmar berasal dari China (9,4 miliar dolar), Thailand (4,11 miliar dolar), Singapura (2,44 miliar dolar), Jepang (1,04 miliar dolar), dan India (859 juta dolar) (Tirto, 2017).

Dalam menanggapi kasus kemanusiaan etnis Rohingya pasca konflik di Rakhine tahun 2017, China mendukung pemerintah Myanmar. Pada bulan September 2017 Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun menyampaikan bahwa pemerintah Myanmar melakukan negosiasi dengan China untuk menggagalkan setiap resolusi yang dikeluarkan DK PBB terkait kasus Rohingya, mengingat China memiliki kuasa untuk menggunakan hak veto sebagai anggota tetap DK PBB (Detik, 2017). Dukungan penuh China terhadap pemerintah Myanmar disinyalir berdasarkan motif ekonomi dibaliknya. China, sebagai mitra dagang paling berpengaruh bagi perekonomian Myanmar tersebut lebih memilih untuk melindungi hubungan ekonominya dengan Myanmar, dengan tidak ikut campur terhadap konflik yang terjadi di Rakhine pada tahun 2017. China mengatakan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa China memahami bahwa apa yang dilakukan oleh militer Myanmar merupakan upaya untuk melindungi stabilitas pembangunan nasionalnya dan mendukung segala keputusan pemerintah Myanmar, serta berharap ketegangan yang terjadi di Rakhine segera berakhir (Detik, 2017). China juga akan berencana akan mengirimkan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh (Sindonews, 2017).

Pada konferensi pers bersama Aung San Suu Kyi pada 20 November 2017, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, menawarkan tiga tahap solusi untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya. Tahap pertama, masing-masing pihak harus melakukan genjatan senjata. Genjatan senjata ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kembali aman di Rakhine, sehingga etnis Rohingya tidak perlu mencari perlindungan ke negara lain. Kedua, adanya dorongan dari masyarakat internasional untuk menjaga komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh untuk menemukan solusi yang adil. Ketiga, adanya solusi jangka panjang terkait krisis Rohingya, dimana akar permasalahan dari krisis ini adalah faktor kemiskinan. Maka dari itu, Menteri Luar Negeri China menghimbau masyarakat internasional untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Rakhine (Kompas, 2017).

China menjadi *backing* kuat bagi Myanmar, mengingat China merupakan salah satu negara penting bagi Myanmar dimana aktivitas ekonomi Myanmar

bergantung pada China begitu pula sebaliknya. Bukan hanya berpengaruh dari segi ekonominya saja, kerja sama militer antara China dan Myanmar sangat solid sejauh ini. Bahkan pada bulan November 2017, masih dalam keadaan panas situasi di Myanmar, dimana kondisi keamanan di wilayah Rakhine yang tidak stabil dan cepat berubah serta di sisi lain masyarakat internasional sedang mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine, China justru akan memperkuat hubungan militer dengan Myanmar. Harapan China dengan adanya kerjasama militer ini adalah untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di wilayah perbatasan masing-masing negara (CNN, 2017).

Konflik yang terjadi di Rakhine pada 25 Agustus 2017 bukanlah kali pertama militer Myanmar melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Oleh sebab itu, banyak pihak asing yang menyayangkan konflik berkepanjangan di Myanmar masih saja terjadi. Tak sedikit pula masyarakat internasional yang ikut serta dalam berupaya membantu menyelesaikan konflik di Rakhine sebagai bentuk empati terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Nasib etnis Rohingya yang memprihatinkan pasca konflik tersebut; tidak memiliki tempat tinggal, kelaparan, dan terancam kematian, menunjukkan bahwa konflik tersebut bukan lagi konflik dalam negeri, namun telah menjadi krisis kemanusiaan dan membutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaian kasus ini. Namun, respon yang ditunjukkan masyarakat internasional terkait kasus ini tidak tepat sasaran dan kurang tanggap dalam menangani kasus kemanusiaan ini sehingga sikap dari pihak-pihak asing tersebut tidak di gubris oleh pemerintah Myanmar. Dari sekian banyak respon yang diterima pemerintah Myanmar terkait konflik yang terjadi di Rakhine pada bulan Agustus 2017 hingga menyebabkan krisis pengungsi Rohingya, hanya China yang dapat diterima oleh pemerintah Myanmar. Namun sayangnya, China berada pada pihak pemerintah Myanmar, dimana hal tersebut tidak dapat menjadi solusi atas krisis pengungsi Rohingya. Karena keberpihakan China yang berat sebelah kepada pemerintah Myanmar, bukan langkah solutif dalam menyelesaikan kasus ini.

Selain China, Indonesia adalah negara yang diterima oleh pemerintah Myanmar. Pasca terjadinya konflik di wilayah Rakhine pada akhir bulan Agustus 2017, Indonesia adalah negara pertama yang diterima Myanmar untuk berkunjung ke negaranya, mengingat pasca kejadian tersebut Myanmar memblokir akses masuk bagi pihak asing. Sikap pemerintah Myanmar terkait pemblokiran akses dari pihak asing tersebut disinyalir karena situasi di wilayah konflik, yakni Rakhine, masih belum stabil. Kondisi yang tidak stabil ini rawan akan terjadinya *chaos* yang semakin memperparah keadaan. Kunjungan diplomatik ke Myanmar untuk melakukan dialog dengan pemerintah Myanmar yang dilakukan Indonesia tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya akses dari pemerintah Myanmar. Sedangkan akses tersebut tidak mungkin diberikan apabila pemerintah Myanmar tidak memberikan kepercayaannya kepada Indonesia, mengingat pasca konflik pada akhir bulan Agustus 2017, wilayah konflik yakni Rakhine masih belum dalam keadaan stabil. Kepercayaan yang diberikan pemerintah Myanmar ini didasarkan pada hubungan diplomatik yang sudah lama terjalin baik dengan Indonesia. Pendekatan proaktif yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar merupakan langkah tepat untuk membangun kepercayaan pemerintah Myanmar. Selain itu aktivitas diplomatik Indonesia yang mengedepankan dialog dalam penyelesaian masalah ini merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya pasca konflik di Rakhine pada akhir bulan Agustus 2017.

### **3.2 Hubungan Baik Antara Indonesia dan Myanmar serta Adanya Kesamaan Antara Indonesia dan Myanmar**

Indonesia dan Myanmar merupakan negara yang keduanya berada dalam satu kawasan geografis di wilayah Asia Tenggara. Namun sejarah awal hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Myanmar bukan karena berada dalam satu organisasi regional yang sama, yakni ASEAN. Lebih daripada itu, hubungan baik yang terjalin antara kedua negara ini sudah berlangsung jauh sebelum Myanmar masuk dalam keanggotaan ASEAN. Myanmar adalah salah satu negara yang berperan banyak ketika Indonesia sedang berjuang pada masa kemerdekaan.

Negara bisa dikatakan merdeka, salah satu syaratnya ialah adanya pengakuan dari negara lain (Sujadmiko, 2012: 179). Begitu pula perjuangan Indonesia ketika baru merdeka, Myanmar merupakan salah satu negara yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia baru merdeka, Myanmar merupakan salah satu negara yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan Indonesia agar diakui kemerdekaannya di dunia Internasional. Indonesia diijinkan untuk membuka *Indonesian Office* di Myanmar, yang nantinya menjadi cikal bakal Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar (KBRI di Myanmar, 2007). Padahal kala itu, tepatnya pada tahun 1947, Myanmar masih dalam masa transisi untuk memperoleh kemerdekaannya.

Hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar dibuktikan dengan bagaimana kedua negara ini saling mendukung satu sama lain. Indonesia dan Myanmar, beserta India dan Mesir, juga terlibat dalam terbentuknya Gerakan Non-Blok hingga terselenggara Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Ketika Indonesia hampir kehilangan wilayah Irian Barat pada tahun 1962 karena direbut Belanda pun, Indonesia mendapat dukungan dari Myanmar (Detik, 2017). Indonesia juga merupakan salah satu negara yang aktif mendorong Myanmar untuk bergabung menjadi anggota ASEAN, dan akhirnya berhasil menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997.

Sejak pemerintah sipil Myanmar dikudeta militer hingga menyebabkan pemerintahan Myanmar diambil alih oleh militer, terhitung setelah tahun 1962, hubungan Indonesia dengan Myanmar sempat merenggang. Sejak pemerintahan Myanmar dipimpin oleh junta militer, Myanmar kemudian menjadi negara sosialis (Detik, 2017). Namun Indonesia dan Myanmar masih menjalin hubungan baik, dibuktikan dengan silaturahmi antar pemimpin negara yang masih terjalin dengan baik. Catatan sejarah mengatakan, Presiden Soeharto pernah mengunjungi Myanmar pada tanggal 26 November 1972. Kemudian Jendral Ne Win melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada 11 Juni 1973. Pada tanggal 8 Juni 1974 Jendral Ne Win melakukan kunjungan ke Indonesia, dan Presiden Soeharto melakukan kunjungan balasan pada tanggal 26 Agustus 1974. Kunjungan selanjutnya ialah ketika Myanmar dipimpin oleh Jendral Than Shwe, pemimpin

Myanmar tersebut mengunjungi Indonesia pada 5 Juni 1995, bulan November 1996, dan kembali melakukan kunjungan pada bulan April 2005. Sedangkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia melakukan kunjungan ke Myanmar pada tanggal 7 November 1999. Presiden Megawati Soekarnoputri mengunjungi Myanmar pada 24 Agustus 2001. Kemudian ketika ASEAN menuntut Myanmar mempercepat proses demokratisasinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah kepala negara anggota ASEAN pertama yang mengunjungi Myanmar. Dan kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diterima dengan baik oleh pimpinan junta militer Than Shwe (KBRI di Myanmar, 2007).

Hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar tidak bisa lepas dari ikatan emosional, dimana keduanya memiliki banyak kesamaan; sama-sama negara yang merdeka dari penjajah, merupakan negara multietnis, dan sama-sama pernah merasakan pemerintahan yang dipimpin oleh dominasi militer (KBRI di Myanmar, 2007). Hubungan baik yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Myanmar menjadi jembatan bagi Indonesia untuk mendorong Myanmar agar segera menyelesaikan krisis kemanusiaan yang ada di negaranya.

### **3.3 Agenda Strategis Politik Luar Negeri Indonesia**

Setiap sikap yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, termasuk sikap yang diambil untuk ikut serta terlibat dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya, tidak lepas dari politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada agenda strategis politik luar negeri Indonesia, alasan Indonesia terlibat dalam menyelesaikan kasus kemanusiaan ini yaitu sebagai bentuk pelaksanaan cita-cita bangsa. Setiap kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, tidak dilakukan begitu saja. Terdapat landasan yang dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijakan politik luar negeri tersebut dilakukan untuk mencapai cita-cita bangsa. Sikap Indonesia dengan ikut terlibat dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya berdasarkan pada tiga hal, yakni; landasan idiiil politik luar negeri indonesia, landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, dan Landasan Operasional politik luar negeri Indonesia.

### 3.3.1 Landasan Idiil Politik Luar Negeri Indonesia

Setiap kebijakan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia ini tercantum dalam landasan idiil politik luar negeri Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi latar belakang Indonesia ikut terlibat dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya. Makna kemanusiaan yang beradab bermakna menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai sesama makhluk Tuhan. Hal ini sejalan dengan pernyataan hak asasi manusia sedunia yang disetujui oleh PBB pada tahun 1948, yang tercantum dalam *Declaration of Human Rights*. Deklarasi ini menyatakan bahwa manusia dilahirkan memiliki hak-hak universal yang sama, yakni hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dan tidak dibenarkan untuk menghukum atau menganiaya seseorang atau sekelompok orang secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan landasan idiil Pancasila sila ke-2, tujuan Indonesia untuk terlibat dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya adalah Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang adil dan beradab.

### 3.3.2 Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Terlibatnya Indonesia dalam membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya merupakan wujud pelaksanaan amanah terhadap cita-cita bangsa tersebut. Isu kemanusiaan yang terjadi di wilayah Rakhine, hingga menyebabkan krisis pengungsi Rohingya yang tersebar ke beberapa negara tetangga Myanmar, bukan lagi dipandang sebagai konflik dalam negeri Myanmar. Terlebih pada krisis pengungsi Rohingya tahun 2015 yang menyebabkan banyak etnis Rohingya terdampar di laut Thailand, Malaysia, dan Indonesia, telah menjadi isu kawasan. Selain itu apabila krisis pengungsi ini tidak lekas diatasi akan rawan ditumpangi isu perdagangan manusia hingga terorisme. Maka dari itu,

keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya adalah wujud pelaksanaan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia.

### 3.3.3 Landasan Operasional Politik Luar Negeri Indonesia

Selain karena adanya landasan idiil dan landasan konstitusional, terlibatnya Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya juga berdasarkan pada landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas-aktif. Prinsip bebas-aktif ini bersifat fleksibel, dalam artian dapat dimaknai sesuai kondisi dan tantangan strategis yang dihadapi bangsa Indonesia. Prinsip bebas-aktif Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 tertuang dalam visi yakni terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi yakni; memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam dunia internasional untuk memajukan kepentingan nasional, memantapkan peran kementerian luar negeri sebagai penjuror pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional, serta mewujudkan kapasitas kementerian luar negeri dan perwakilan Indonesia yang mumpuni (LJK Kemlu, 2017: vii). Selain berpedoman pada visi dan misi kementerian luar negeri Indonesia, keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian krisis pengungsi Rohingya juga mempertimbangkan isu-isu strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Menurut Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2017, penanganan terhadap isu kemanusiaan dan upaya menciptakan perdamaian dunia adalah dua isu strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia (LJK Kemlu, 2017: 3). Berdasarkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia tersebut, keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya termasuk dalam misi Kementerian Luar Negeri Indonesia yakni memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia untuk memajukan kepentingan nasional. Telah diatur pada Laporan Kinerja tersebut, terdapat empat prioritas utama capaian diplomasi Indonesia meliputi; menjaga kedaulatan NKRI, perlindungan WNI di luar negeri,

diplomasi ekonomi, dan peningkatan peran di kawasan dan internasional (LJK Kemlu, 2017: i). Terkait langkah Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya, Indonesia telah mencapai salah satu dari empat capaian tersebut, yakni peningkatan peran di kawasan dan Internasional. Hal ini tercermin dari serangkaian langkah diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia dan kepeloporan Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya. Langkah diplomasi Indonesia mampu meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Hal ini berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa peran diplomasi kemanusiaan dan perdamaian Indonesia, berhasil mendapatkan apresiasi dari dunia internasional (LJK Kemlu, 2017: i). Selain itu, penyelesaian kasus kemanusiaan Rohingya juga termasuk dalam isu strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia yang tercantum dalam Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2017 (LJK Kemlu, 2017: 3).

Ketiga alasan yang telah disebutkan di atas, yakni; karena Indonesia adalah negara yang dipercaya oleh Myanmar, karena hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar, serta adanya kesamaan antara Indonesia dan Myanmar, karena langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya termasuk dalam agenda strategis politik luar negeri Indonesia, merupakan alasan Indonesia ikut terlibat dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, hal tersebut melatar belakangi Indonesia melakukan langkah-langkah diplomasi untuk menyelesaikan kasus kemanusiaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya, yang akan dibahas pada bab empat.

asing, Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional, serta melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait solusi penyelesaian krisis pengungsi Rohingya.

Diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia adalah langkah tepat dalam menyelesaikan kasus ini. Pendekatan yang dilakukan Indonesia dengan diawali menjalin komunikasi baik via telepon maupun kunjungan diplomatik ke Myanmar, membangun kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia. Setelah menjalin komunikasi dengan pemerintah Myanmar, Indonesia mendapatkan informasi yang akurat dari pemerintah Myanmar terkait kondisi terkini di wilayah konflik dan kebutuhan para korban konflik. Informasi ini berguna bagi masyarakat internasional agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan korban konflik. Selain itu, adanya kepercayaan dari pemerintah Myanmar terhadap Indonesia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menegosiasikan solusi atas penyelesaian krisis pengungsi ini. Indonesia memberikan solusi dengan formula 4+1. Berkat adanya negosiasi ini, pemerintah Myanmar membuka aksesnya bagi pihak asing untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik.

Selain melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar, Indonesia juga melakukan komunikasi dengan pemerintah Bangladesh baik melalui telepon maupun kunjungan diplomatik. Indonesia melakukan kunjungan diplomatik ke Bangladesh pada tanggal 5 September 2017. Di samping Myanmar, Bangladesh juga merupakan negara kunci atas penyelesaian krisis pengungsi ini mengingat Bangladesh adalah negara utama tujuan pengungsi Rohingya. Maka dari itu, Indonesia melakukan kunjungan diplomatik ke Bangladesh untuk menegosiasikan solusi agar Bangladesh bersedia memberi perlindungan terhadap pengungsi Rohingya. Berkat negosiasi ini, Bangladesh bersedia memberi perlindungan kepada para pengungsi Rohingya. Kemudian pada tanggal 23 November 2017 Myanmar dan Bangladesh mengadakan pertemuan bilateral di Myanmar untuk membicarakan masalah pengungsi Rohingya. Pertemuan ini dapat terlaksana atas dorongan Indonesia. Pertemuan bilateral ini menghasilkan kesepakatan repatriasi pengungsi Rohingya, yang sepakat dilakukan pada bulan Januari 2018.

Mengacu pada studi kasus ini, diplomasi dengan menggunakan ancaman keras berupa desakan yang seakan memojokkan pemerintah Myanmar maupun ancaman embargo, tidak tepat dilakukan karena hanya membuat hubungan bilateral dengan Myanmar semakin renggang. Sikap masyarakat internasional lain yang menerapkan diplomasi dengan menggunakan ancaman keras yang memojokkan pemerintah Myanmar maupun ancaman embargo, di sisi lain hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia. Kontras dengan sikap masyarakat internasional lain yang menyalahkan pemerintah Myanmar, Indonesia hadir sebagai kawan lama Myanmar dengan diplomasi kemanusiaannya. Langkah diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia ini menghasilkan kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia, sehingga krisis pengungsi Rohingya akibat konflik pada tahun 2017 dapat diatasi.

Berdasarkan studi kasus ini, diplomasi kemanusiaan dapat menjadi instrumen yang tepat dilakukan untuk menangani permasalahan kemanusiaan seperti krisis pengungsian. Diplomasi kemanusiaan berhasil diterapkan pada permasalahan pengungsian karena tujuan utamanya adalah menolong korban konflik. Praktek diplomasi kemanusiaan yang netral dan tidak ikut campur ke dalam urusan politik pihak-pihak yang berkonflik, dapat membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri. Dengan adanya kepercayaan tersebut, aktor diplomasi kemanusiaan bisa memiliki akses pada korban konflik, sehingga krisis kemanusiaan yang dialami korban konflik dapat segera diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Collins, C dan J. Packer. 2006. *Options and Techniques for Quite Diplomacy*. Stockholm: Folke Bernadotte Academy.
- Clad. 2011. *The Borderlands of Southeast Asia (Geopolitics, Terrorism, and Globalization)*. Washington: The Center for Strategic Research Institute for National Strategic Studies by National Defense University Press.
- Minear, Larry dan Smith, Hazel. 2007 *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*. Tokyo: United Nations University Press.
- Moses, Dirk. 2010. *History, Genocide and Ethnic Cleansing, Social and Cultural History; Raphael Lemkin, Culture, and The Concept of Genocide*. Oxford: Oxford University Press.

### Buku Terbitan Lembaga/Organisasi

- Abidin, Zainal. Eddyono, S., 2017. *Degradasi Extraordinary Crimes; Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP*. <https://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/08/Problematika-Perumusan-Kejahatan-Genosida-dan-Kejahatan-Terhadap-Kemanusiaan-dalam-RKUHP.pdf>. Diakses pada 18 Desember 2017.
- Amnesty International. 1997. *Myanmar/Bangladesh Rohingyas-The Search for Safety*. <https://www.amnesty.org/download/Documents/160000/asa130071997en.pdf>. Diakses pada 14 Maret 2018.
- ASEAN. 2016. *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967*. <https://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/>. Diakses pada 26 Februari 2018.
- Bustaman. 2013. *Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan*. <https://jurnallektur.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/download/72/158>. Diakses pada 18 Desember 2017.
- Human Rights Watch. 2013. *All You Can Do is Pray; Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*. New York: Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes->

[against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims](#). Diakses pada 2 oktober 2017.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2014. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: Badan Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>. Diakses pada 18 Desember 2017.

LJK Kemlu. 2017. *Laporan Kinerja 2017*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://www.kemlu.go.id/AKIP/LKJ%20KEMLU%202017%20BUKU%20I.pdf>. Diakses pada 26 Mei 2018.

### **Jurnal Ilmiah**

Chan. 2005. The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar). *SOAS Bulletin of Burma Research*. 3(2): 396-420.

Dewinta. T.A. 2016. Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations*. 2(2): 127-134.

Pramono, S. 2014. Efektivitas Embargo Dalam Mendorong Demokratisasi di Myanmar. *Forum Ilmu Sosial*. 41(1): 131-141.

Sujadmiko, B. 2012. Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo). *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1): 178-189.

### **Artikel dalam Prosiding**

Kim, F. 2015. *ASEAN Politics: Playing Pass—Who Should Accept Responsibility for the Rohingya Refugees at Sea. Proceedings of The First International Conference on ASEAN Studies Emerging ASEAN Community 2015*. Bangkok: Pridi Banomyong International College. 3 – 4 Oktober 2015. *SIM Global Education*: 0-13.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Anggara, M. 2014. Motivasi Amerika Serikat Menjatuhkan Embargo Ekonomi terhadap Myanmar Tahun 2007. *Tesis*. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Hardianti, E. 2015. Kebijakan Uni Eropa Dalam Menghentikan Proliferasi Nuklir Iran Tahun 2009 – 2013. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurhandayani, D. 2013. Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pramono, A. 2010. Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002). *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Waskito, Y.T. 2016. HAM dan Kewarganegaraan, Studi Kasus : Etnis Rohingya di Myanmar. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Revolusi, A. 2013. Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

#### Artikel dari Internet

Muhammad, S.V. 2012. Tragedi Kemanusiaan Rohingya. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20Singkat-IV-15-I-P3DI-Agustus-2012-7.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-IV-15-I-P3DI-Agustus-2012-7.pdf). Diakses pada 19 Desember 2017.

Muhamad, S.V. 2015. Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat%20Singkat-VII-10-II-P3DI-Mei-2015-7.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat%20Singkat-VII-10-II-P3DI-Mei-2015-7.pdf). Diakses pada 20 Januari 2018.

Pujayanti, A. 2017. Indonesia dan Tragedi Kemanusiaan Rohingya. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-179.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-179.pdf). Diakses pada 15 Desember 2017.

#### Berita Online

Akbar, A. 2012. *Warga Rohingya di Perang Dunia II*. <https://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679202/warga-rohingya-di-perang-dunia-ii#lastread>. Diakses pada 1 Februari 2018.

- Aquadini, S.P. 2017. *Konflik di Myanmar Memburuk, Korban Tewas Hampir 100 Orang*. <https://dunia.tempo.co/amp/903735/konflik-di-myanmar-memburuk-korban-tewas-hampir-100-orang>. Diakses pada 12 Maret 2018.
- Ardiansyah, F. 2015. *Sekilas Sejarah Tentang Imigran Rohingya*. <https://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya>. Diakses pada 12 April 2018.
- Arungbudoyo, W. 2017. *Kronologi kekerasan di rakhine pemicu eksodus muslim rohingya*. <https://news.okezone.com/read/2017/08/31/18/1767078/kronologi-kekerasan-di-rakhine-pemicu-eksodus-muslim-rohingya> . Diakses pada 5 September 2017.
- Arungbudoyo, W. 2018. *Bangladesh Tunda Proses Pemulangan Etnis Rohingya ke Myanmar*. <https://news.okezone.com/read/2018/01/22/18/1848509/bangladesh-tunda-proses-pemulangan-etnis-rohingya-ke-myanmar#lastread>. Diakses pada 18 Februari 2018.
- Arungbudoyo, W. 2018. *Kecewa dengan Suu Kyi, Diplomat AS Mundur dari Dewan Penasihat Rohingya*. <https://news.okezone.com/read/2018/01/25/18/1850322/kecewa-dengan-suu-kyi-diplomat-as-mundur-dari-dewan-penasihat-rohingya>. Diakses pada 15 Februari 2018.
- Asril, S. 2017. *Indonesia Mulai Bangun Rumah Sakit di Rakhine, Myanmar*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/15285611/indonesia-mulai-bangun-rumah-sakit-di-rakhine-myanmar>. Diakses pada 17 Februari 2018.
- BBC. 2015. *Ratusan Orang Rohingya Terdampar di Aceh*. [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150510\\_aceh\\_rohingya\\_kapal](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150510_aceh_rohingya_kapal). Diakses pada 28 Mei 2018.
- BBC. 2016. *Indonesia Izinkan Pengungsi Rohingya Lewati Batas Waktu*. [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160226\\_indonesia\\_rohingya\\_izin](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160226_indonesia_rohingya_izin). Diakses pada 29 Mei 2018.
- BBC. 2016. *Malaysia Sayangkan Pengungsi Rohingya Lari dari Aceh*. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160223\\_dunia\\_pengungsi\\_rohingya\\_aceh](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160223_dunia_pengungsi_rohingya_aceh). Diakses pada 28 Mei 2018.
- BBC. 2016. *Menlu RI Minta Myanmar Hormati dan Lindungi Hak Minoritas Muslim*. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38231911>. Diakses pada 27 Mei 2018.

- BBC. 2017. *Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh 'Mulai Dibagikan Hari Ini'*. <https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41302028>. Diakses pada 14 Maret 2018.
- BBC. 2017. *Krisis Rohingya: Gerilyawan Muslim Umumkan Gencatan Senjata Sementara*. <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41216919>. Diakses pada 14 Maret 2018.
- BBC. 2017. *Kunjungan Tim PBB ke Rakhine 'Dibatalkan' Oleh Myanmar*. <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41416099>. Diakses pada 12 maret 2018.
- BBC. 2017. *PBB Minta Akses Penuh untuk Selidiki Krisis Rohingya di Myanmar*. <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41319975>. Diakses pada 8 Februari 2018.
- BBC. 2017. *Pemerintah Myanmar 'Tolak' Gencatan Senjata Gerilyawan Rohingya*. <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41220141>. Diakses pada 14 Maret 2018.
- Berlianto. 2017. *Krisis Rohingya, AS Serukan Embargo Senjata Terhadap Myanmar*. <https://internasional.sindonews.com/read/1243900/42/krisis-rohingya-as-serukan-embargo-senjata-terhadap-myanmar-1506642172>. Diakses pada 27 Februari 2018.
- Berlianto. 2017. *Krisis Rohingya, China Tawarkan Dukungan kepada Myanmar di PBB*. <https://internasional.sindonews.com/read/1241028/40/krisis-rohingya-china-tawarkan-dukungan-kepada-myanmar-di-pbb-1505802757>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- Berlianto. 2017. *Parlemen Arab Serukan Tindakan Internasional Terhadap Rohingya*. <https://internasional.sindonews.com/read/1237404/44/parlemen-arab-serukan-tindakan-internasional-terhadap-rohingya-1504752203>. Diakses pada 14 Februari 2018.
- Bhawono, A. 2017. *Riwayat Panjang Hubungan RI – Myanmar Tanpa Cela*. <https://m.detik.com/news/berita/d-3630263/riwayat-panjang-hubungan-ri-myanmar-tanpa-cela>. Diakses pada 11 Februari 2018.
- Bonasir, R. 2015. *Mengapa Orang – Orang Rohingya Melarikan Diri dari Myanmar?*. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150522\\_dunia\\_myanmar\\_e\\_xodus](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150522_dunia_myanmar_e_xodus). Diakses pada 9 Maret 2018.
- Bonasir, R. 2016. *Pengungsi Rohingya di Aceh 'Mungkin akan Habis' Sebelum Setahun*.

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160227\\_indonesia\\_pengungsi\\_rohingya\\_tenggat](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160227_indonesia_pengungsi_rohingya_tenggat). Diakses pada 12 Maret 2018.

Bruxelles. 2017. *Deklarasi Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini Atas Nama Uni Eropa pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia*. <https://eeas.europa.eu/headquarters-homepage/37054/deklarasi-perwakilan-tinggi-uni-eropa-federica-mogherini-atas-nama-uni-eropa-pada-peringatan-id>. Diakses pada 5 Maret 2018.

Choirul. 2013. *Uni Eropa Cabut Sanksi Untuk Myanmar*. <https://dunia.tempo.co/amp/475269/uni-eropa-cabut-sanksi-untuk-myanmar>. Diakses pada 15 Februari 2018.

Christiastuti, N. 2017. *Begini Awal Mula Serangan Besar – Besaran Militan Rohingya di Rakhine*. <https://m.detik.com/news/internasional/3632173/begini-awal-mula-serangan-besar-besaran-militan-rohingya-di-rakhine>. Diakses pada 7 Februari 2018.

Christiastuti, 2017. *Dapat Izin Myanmar, Turki Mulai Salurkan Bantuan untuk Rohingya*. <https://m.detik.com/news/internasional/3630494/dapat-izin-myanmar-turki-mulai-salurkan-bantuan-untuk-rohingya>. Diakses pada 28 Februari 2018.

Christiastuti, N. 2017. *Krisis Rohingya, Inggris Hentikan Pelatihan Militer Myanmar*. <https://m.detik.com/news/internasional/d-3651992/krisis-rohingya-inggris-hentikan-pelatihan-militer-myanmar>. Diakses pada 15 Februari 2018.

Corben, R. 2015. *Aceh Berperan Besar Bantu Pengungsi Rohingya*. <https://www.voaindonesia.com/amp/aceh-berperan-besar-bantu-pengungsi-rohingya/2824579.html>. Diakses pada 10 Maret 2018.

Daaruttauhid, 2017. *Release Resmi Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)*. <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/news/detail/Release-Resmi-Aliansi-Kemanusiaan-Indonesia-untuk-Myanmar-AKIM>. Diakses pada 17 Februari 2018.

Deutsche Welle (DW). 2012. *Ribuan Warga Myanmar Mengungsi*. <https://m.dw.com/id/ribuan-warga-myanmar-mengungsi/a-16028771>. Diakses pada 10 Maret 2018.

Deutsche Welle (DW). 2013. *Uni Eropa Cabut Total Embargo Ekonomi atas Myanmar*. <https://m.dw.com/id/uni-eropa-cabut-total-embargo-ekonomi-atas-myanmar/a-16763989>. Diakses pada 27 Februari 2018.

- Deutsche Welle (DW). 2015. *Indonesia, Malaysia, Thailand, dan PBB Bahas Pengungsi Rohingya*. <http://www.dw.com/id/indonesia-malaysia-thailand-dan-pbb-bahas-pengungsi-rohingya/a-18456105>. Diakses pada 28 Mei 2018.
- Deutsche Welle (DW). 2015. *Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya*. <https://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>. Diakses pada 1 Februari 2018.
- Deutsche Welle (DW). 2017. *Bangladesh Puji Kepemimpinan Indonesia Soal Rohingya*. <https://amp.dw.com/id/bangladesh-puji-kepemimpinan-indonesia-soal-rohingya/a-40362495>. Diakses pada 13 Maret 2018.
- Deutsche Welle (DW). 2017. *Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya*. <https://amp.dw.com/id/indonesia-turun-tangan-bantu-rohingya/a-40351496>. Diakses pada 10 Maret 2018.
- Deutsche Welle (DW). 2017. *Warga Rohingya Terjepit dalam Konflik di Myanmar*. <https://amp.dw.com/id/warga-rohingya-terjepit-dalam-konflik-di-myanmar/a-40329932>. Diakses pada 8 Februari 2018.
- Erdianto, K. 2016. *Bahas Krisis Rohingya, menlu Retno Akan Bertemu Aung San Suu Kyi*. <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/11192091/bahas.krisis.rohingya.menlu.retno.akan.bertemu.aung.san.suu.kyi>. Diakses pada 12 Maret 2018.
- Ericssen. 2017. *Bantuan PBB Diblokir, Nestapa Rohingya Bertambah Parah*. <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/05/1832431/bantuan-pbb-diblokir-nestapa-rohingya-bertambah-parah>. Diakses pada 8 Februari 2018.
- Faiz, D. 2017. *China dan Rusia Tolak Resolusi PBB soal Rohingya*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20171225191555-106-264752/china-dan-rusia-tolak-resolusi-pbb-soal-rohingya>. Diakses pada 18 Februari 2018.
- Firman, T. 2017. *Rohingya: Membandingkan Respons Indonesia & Negara Lain*. <https://amp.tirto.id/rohingya-membandingkan-respons-indonesia-amp-negara-lain-cv3b>. Diakses pada 16 Februari 2018.
- Firmansyah, M.J. 2017. *Bahas Rohingya, menteri Retno ke Myanmar Temui Aung San Suu Kyi*. <https://nasional.tempo.co/amp/905637/bahas-rohingya-menteri-retno-ke-myanmar-temui-aung-san-suu-kyi>. Diakses pada 12 Maret 2018.

- Frieze, D.L. 2013. *Life of Raphael Lemkin*. <http://lemkinhouse.org/about-us/life-of-raphael-lemkin/>. Diakses pada 5 Desember 2017.
- Hasan, A. M. 2016. *Membunuh Rohingya Secara Diam – Diam*. <https://amp.tirto.id/membunuh-rohingya-secara-diam-diam-b44x>. Diakses pada 9 Maret 2018.
- Hasan, R.A. 2017. *Inggris Puji Langkah Indonesia dalam Penyelesaian Krisis Rohingya*. <https://m.liputan6.com/amp/3128523/inggris-puji-langkah-indonesia-dalam-penyelesaian-krisis-rohingya>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- Head, J. 2017. *Di Balik Perjuangan Kelompok Militan Muslim Rohingya, ARSA*. <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41581450>. Diakses pada 10 Maret 2018.
- Head, J. 2017. *Krisis Rohingya: Apa yang Dipergoki Wartawan BBC di Desa – Desa yang Terbakar itu?*. <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41236682>. Diakses pada 8 Februari 2018.
- Hidayat, Wandha. 2017. *Jalan Panjang Penderitaan Rohingya*. <https://kumparan.com/wandha-hidayat/jalan-panjang-penderitaan-rohingya>. Diakses pada 2 oktober 2017.
- Human Rights Watch. 2017. *Rohingya Crisis: 10 Principles for Protecting Refugees*. <https://www.hrw.org/news/2017/11/07/rohingya-crisis-10-principles-protecting-refugees>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- Hutapea, R.U. 2017. *Bangladesh Tawarkan Operasi Militer Untuk Pereangi Militan Rohingya*. <https://m.detik.com/news/internasional/d-3619952/bangladesh-tawarkan-operasi-militer-untuk-perangi-militan-rohingya>. Diakses pada 15 Februari 2018.
- Hutapea, R.U. 2017. *Cegah Resolusi PBB Soal Rohingya, Myanmar Bujuk China dan Rusia*. <https://m.detik.com/news/internasional/3631528/cegah-resolusi-pbb-soal-rohingya-myanmar-bujuk-china-dan-rusia>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- Hutapea, R.U. 2017. *Rakhine Bergejolak, Ini Sikap Malaysia Terkait Pengungsi Rohingya*. <https://m.detik.com/news/internasional/3627840/rakhine-bergejolak-ini-sikap-malaysia-terkait-pengungsi-rohingya>. Diakses pada 13 Februari 2018.

- Hutapea, R.U. 2017. *Uni Eropa Akan Bahas Krisis Rohingya dengan Aung San Suu Kyi*. <https://m.detik.com/news/internasional/d-3734669/uni-eropa-akan-bahas-krisis-rohingya-dengan-aung-san-suu-kyi>. Diakses pada 27 Februari 2018.
- Ihsanuddin. 2017. *Bantu Rohingya, Menlu Retno Akan Terbang ke Myanmar*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/16594071/1/bantu-rohingya-menlu-retno-akan-terbang-ke-myanmar>. Diakses pada 13 Maret 2018.
- Ihsanuddin. 2018. *Komisaris Tinggi HAM PBB Puji Indonesia Bantu Krisis Rohingya*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/14325331/komisioner-tinggi-ham-pbb-puji-indonesia-bantu-krisis-rohingya>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- Iqbal, M. 2017. *Menlu Turki Hingga Kofi Annan Telepon Retno Minta RI Bantu Rohingya*. <https://m.kumparan.com/@kumparannews/menlu-turki-hingga-kofi-annan-telepon-retno-minta-ri-bantu-rohingya>. Diakses pada 12 Maret 2018.
- Jones, D. 2017. *Utusan Turki Kunjungi Bangladesh untuk Bantu Pengungsi Rohingya*. <https://www.voaindonesia.com/amp/utusan-turki-kunjungi-bangladesh-untuk-bantu-pengungsi-rohingya/4018682.html>. Diakses pada 28 September 2018.
- Jordan, R. 2017. *Di KTT ASEAN, Jokowi: Kita Tak Bisa Berdiam Diri Soal Rakhine State*. <https://m.detik.com/news/berita/3725193/di-ktt-asean-jokowi-kita-tak-bisa-berdiam-diri-soal-rakhine-state>. Diakses pada 17 Februari 2018.
- Kardi, D.D. 2017. *Di Bangladesh, Menlu Retno Bahas Pengungsi Rohingya*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170906002430-106-239709/di-bangladesh-menlu-retno-bahas-pengungsi-rohingya>. Diakses pada 17 Februari 2018.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Myanmar. 2007. *Hubungan RI-Myanmar Sepanjang Masa*. Yangon: Kedutaan Besar Republik Indonesia. <http://www.kemlu.go.id/yangon/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Hubungan-RI-Myanmar-Sepanjang-Masa.aspx> . Diakses pada 11 Februari 2018.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Myanmar .*Myanmar*. 2015. Yangon: Kedutaan Besar Republik Indonesia. <http://www.kemlu.go.id/yangon/id/Pages/Myanmar1.aspx>. Diakses pada 2 oktober 2017.

- Kemdikbud. 2012. *deregulasi*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. <https://kbbi.web.id/deregulasi.html>. Diakses pada 26 November 2017.
- Kemdikbud. 2012. *bisnis*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. <https://kbbi.web.id/bisnis.html>. Diakses pada 26 November 2017.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)*. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx>. Diakses pada 4 Maret 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya/Rakhine State*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/bantuan-kemanusiaan-indonesia-untuk-rohingya.aspx>. Diakses pada 16 Februari 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Indonesia Bangladesh Perkokoh Kerja Sama Bilateral*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Bangladesh-Perkokoh-Kerja-Sama-Bilateral.aspx>. Diakses pada 29 Mei 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Menlu Retno: ASEAN Ambil Aksi Konkret Untuk Kembalikan Stabilitas di Rakhine State*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-ASEAN-ambil-aksi-konkret-untuk-kembalikan-stabilitas-di-Rakhine-State.aspx>. Diakses pada 29 Mei 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Menlu Retno Hadiri ASEAN Retreat di Yangoon, Myanmar*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-hadiri-ASEAN-Retreat-di-Yangoon.aspx>. Diakses pada 29 Mei 2018.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2017. *Klarifikasi Hoax Terkait Pernyataan Sekjen OKI Tentang Isu Rohingya*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Klarifikasi-Hoax-Terkait-Pernyataan-Sekjen-OKI-Tentang-Isu-Rohingya.aspx>. Diakses pada 14 Februari 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2017. *Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx>. Diakses pada 16 Februari 2018.

- Kistyarini. 2017. *AS: Ada Imbalan Bagi Perubahan Myanmar*. <https://internasional.kompas.com/read/2012/01/16/08575572/AS.Ada.Imbalan.bagi.Perubahan.Myanmar>. Diakses pada 5 Maret 2018.
- Kompas. 2017. *Pemerintah Segera Kirim Bantuan untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/10545641/pemerintah-segera-kirim-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya-di-bangladesh>. Diakses pada 12 Maret 2018.
- Lestari, R. 2017. *Indonesia Akan Bawa Konflik Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB*. <https://news.okezone.com/read/2017/09/05/337/1769735/indonesia-akan-bawa-konflik-rohingya-ke-ktt-ok-i-dan-sidang-umum-pbb#lastread>. Diakses pada 18 Februari 2018.
- Lighton, C. 2010. *PBB Kecam Pemilu Burma*. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101119\\_burmaelection](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101119_burmaelection). Diakses pada 27 Februari 2018.
- Maulana, V. 2017. *AS Hentikan Bantuan Bagi Militer Myanmar*. <https://internasional.sindonews.com/newsread/1251478/42/as-hentikan-bantuan-bagi-militer-myanmar-1508904168>. Diakses pada 15 Februari 2018.
- Maulana, V. 2017. *Menlu Retno Luncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar*. <https://internasional.sindonews.com/newsread/1235597/40/menlu-retno-luncurkan-aliansi-kemanusiaan-indonesia-untuk-myanmar-1504167196>. Diakses pada 17 Februari 2018.
- Maulana, V. 2017. *Menlu Retno: Dunia Apresiasi Langkah RI soal Krisis Rohingya*. <https://internasional.sindonews.com/read/1235582/40/menlu-retno-dunia-apresiasi-langkah-ri-soal-krisis-rohingya-1504165126>. Diakses pada 28 Februari 2017.
- Muhyiddin, M. 2015. *Istana Minta Diplomasi Megaphone RI – Australia Dihentikan*. <https://dunia.tempo.co/amp/649200/istana-minta-diplomasi-megaphone-ri-australia-dihentikan>. Diakses pada 11 Maret 2018.
- Novia, D.R.M. 2017. *Krisis Rohingya, Erdogan Telepon 4 Pemimpin Negara Muslim*. [https://m.republika.co.id/amp\\_version/ovl2xt](https://m.republika.co.id/amp_version/ovl2xt). Diakses pada 14 Februari 2018.
- Perdana, A.V. 2017. *Myanmar Tegaskan Pemulangan Pengungsi Rohingya Mulai Januari 2018*. <https://internasional.kompas.com/read/2017/12/19/18460791/myanmar->

- [tegaskan-pemulangan-pengungsi-rohingya-mulai-januari-2018](#). Diakses pada 18 Februari 2018.
- Pratama, F. 2017. *Bertemu Panglima Myanmar, Menlu Minta Militer Hentikan Kekerasan*. <https://m.detik.com/news/berita/d-3628207/bertemu-panglima-myanmar-menlu-minta-militer-hentikan-kekerasan>. Diakses pada 17 Februari 2018.
- Republika. 2017. *Uni Eropa Puji Peran Indonesia Terkait Rohingya*. [https://m.republika.co.id/amp\\_version/ozx377368](https://m.republika.co.id/amp_version/ozx377368). Diakses pada 28 Februari 2018.
- Reuters. 2017. *Bangladesh Usir Pengungsi Rohingya*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170830093406-106-238269/bangladesh-usir-pengungsi-rohingya>. Diakses pada 8 Februari 2018.
- Rihoi, M.A. 2017. *Tragedi Rohingya dan Mengapa PBB Gagal Hentikan Genosida*. <https://tirto.id/tragedi-rohingya-dan-mengapa-pbb-gagal-hentikan-genosida-cvTH>. Diakses pada 12 Februari 2018.
- Saju, 2017. *Najib Dituding Gunakan Isu Rohingya untuk Kepentingan Politik Pribadi*. <https://internasional.kompas.com/read/2017/01/20/18091001/najib-dituding-gunakan-isu-rohingya-untuk-kepentingan-politik-pribadi>. Diakses pada 13 Februari 2018.
- Samosir, H.A. 2016. *Barack Obama Cabut Sanksi AS Terhadap Myanmar*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20161008104609-134-164166/barack-obama-cabut-sanksi-as-terhadap-myanmar>. Diakses pada 15 Februari 2018.
- Samosir, H.A. 2017. *China Perkuat Relasi dengan Militer Myanmar*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20171123142657-113-257608/china-perkuat-relasi-dengan-militer-myanmar>. Diakses pada 13 Maret 2018.
- Samosir, H.A. 2017. *Soal Rohingya, Uni Eropa Ajukan Sanksi untuk Jendral Myanmar*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20171010091517-134-247331/soal-rohingya-uni-eropa-ajukan-sanksi-untuk-jendral-myanmar>. Diakses pada 15 Februari 2018.
- Samosir, H. A. 2017. *PBB Didesak Embargo Senjata ke Myanmar atas Krisis Rohingya*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170919063820-134-242616/pbb-didesak-embargo-senjata-ke-myanmar-atas-krisis-rohingya>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2017. *Telah Tiba di Bangladesh, Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya*.

<https://setkab.go.id/telah-tiba-di-bangladesh-bantuan-kemanusiaan-indonesia-untuk-rohingya/>. Diakses pada 14 Maret 2018.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2017. *Bertemu Koffi Annan, Presiden Jokowi Sampaikan Langkah Indonesia Bantu Rakhine State, Myanmar*. <http://setkab.go.id/bertemu-kofi-annan-presiden-jokowi-sampaikan-langkah-indonesia-bantu-rakine-state-myanmar/>. Diakses pada 29 Mei 2018.

Shintia, D. 2017. *Inggris Stop Bantu Militer Myanmar*. <https://www.jawapos.com/read/2017/09/21/158529/inggris-stop-bantu-militer-myanmar?amp=1>. Diakses pada 5 Maret 2018.

Slodkowski, A. 2018. *Uni Eropa Desak Myanmar Bebaskan Dua Wartawan*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180111063741-106-268042/uni-eropa-desak-myanmar-bebaskan-dua-wartawan>. Diakses pada 15 Februari 2018.

Suastha, R. D. 2017. *AS Jatuhkan Sanksi kepada Jendral Myanmar Terkait Rohingya*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20171222182204-106-264301/as-jatuhkan-sanksi-kepada-jendral-myanmar-terkait-rohingya/>. Diakses pada 18 Februari 2018.

Suastha, R. D. 2017. *Hari Ini, Bantuan RI Dibagikan ke Rohingya di Bangladesh*. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170918105350-106-242392/hari-ini-bantuan-ri-dibagikan-ke-rohingya-di-bangladesh>. Diakses pada 17 Februari 2018.

Suryanto, 2017. *Myanmar, Bangladesh Sepakati Pemulangan Pengungsi Rohingya*. <https://m.antaranews.com/berita/660708/myanmar-bangladesh-sepakati-pemulangan-pengungsi-rohingya>. Diakses pada 18 Februari 2018.

Tamaim. 2017. *Mengenal Kelompok ARSA di Konflik Rohingya*. <https://nusantara.news/mengenal-kelompok-arsa-di-konflik-rohingya/>. Diakses pada 6 September 2017.

Tempo. 2017. *4 Formula Indonesia Untuk Selamatkan Rohingya*. <https://nasional.tempo.co/amp/906054/4-formula-indonesia-untuk-selamatkan-rohingya>. Diakses pada 14 Maret 2018.

Teresia, A. 2017. *JK Bahas Rohingya Bersama Pemimpin Negara OKI di Sela Sidang PBB*. <https://m.kumparan.com/@kumparannews/jk-bahas-rohingya-bersama-pemimpin-negara-oki-di-sela-sidang-pbb>. Diakses pada 14 Februari 2018.

- Tuwo, A.G. 2017. *AS dan Uni Eropa Siap Sanksi Panglima Militer Myanmar*.  
<https://m.kumparan.com/@kumparannews/as-dan-uni-eropa-siap-sanksi-panglima-militer-myanmar>. Diakses pada 27 Februari 2018.
- Vinanda, R.A. 2017. *Mantap! Sekjen PBB Puji Menlu Retno Terkait Peran RI dalam Membantu Rohingya*.  
<https://news.okezone.com/read/2017/09/30/18/1786048/mantab-sekjen-pbb-puji-menlu-retno-terkait-peran-RI-dalam-membantu-rohingya#lastread>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- VOA. 2017. *Indonesia Atasi Masalah Pengungsi dengan Peraturan Presiden*.  
<https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html>. Diakses pada 28 Mei 2018.
- Wisnu, D. 2017. *Rohingya dan ASEAN*.  
<https://nasional.sindonews.com/read/1241228/18/rohingya-dan-asean-1505832567/>. Diakses pada 13 Februari 2018.
- Yasinta, V. 2017. *China Usulkan Solusi Tiga Tahap Akhiri Krisis Rohingya*.  
<https://internasional.kompas.com/read/2017/11/20/10045861/china-usulkan-solusi-tiga-tahap-akhiri-krisis-rohingya>. Diakses pada 28 Februari 2018.
- Yasinta, V. 2017. *Kuburan Massal, Bukti Pembantaian Etnis Rohingya oleh Militer Myanmar*.  
<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/02/14562771/kuburan-massal-bukti-pembantaian-etnis-rohingya-oleh-militer-myanmar>. Diakses pada 8 Februari 2018.